

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan teori

2.1.1. Pembangunan Ekonomi

Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan Batasan tersebut maka pembangunan ekonomi pada umumnya di definisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka Panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

2.1.1.1. Pembangunan partisipasi sebagai usaha bersama

Setelah pembangunan ekonomi menjadi suatu gerakan internasional seperti sekarang ini, peranan pemerintah tidak hanya menjadi pengendali pasar dan uang serta pembangunan infrastruktur (prasarana), tapi juga sebagai entrepreneur perintis yang membuka cakrawala baru dari perekonomian sesuatu Negara. Lebih jauh daripada itu, seperti ditunjukkan dalam uraian terdahulu, pemerintah juga dianggap bertanggung jawab terhadap terpecahkannya tiga masalah (issue) penting yang menonjol dewasa ini, ialah adanya lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan masalah pemerataan pembangunan. Ketiga issue tersebut menunjukkan bahwa teori ekonomi tentang pembangunan ekonomi yang bertolak dari pendekatan modal tidak cukup tanggap terhadap ketimpangan dalam pembagian pendapat (pemerataan), ketimpangan struktur social dan kelemahan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Konsepsi pembangunan ekonomi yang dikembangkan dari teori pertumbuhan modal tersebut adalah suatu strategi pembangunan yang meletakkan titik berat usahanya pada pembangunan apa yang disebut "*Delivery System*", yang kurang berfungsi untuk menjangkau lapisan bawah.

Bertolak dari pendekatan Schumpeter, yang menganggap perkembangan ekonomi adalah karya dari kaum entrepreneur yang inovatif serta teori dari etika kerja dari Max Weber, berkembanglah teori Mc. Clelland dan teori Hagen yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hasil karya dari segolongan elit yang tanggap dan mampu mengambil tindakan tepat terhadap peluang ekonomi yang

melintas di hadapannya. Sikap tanggap terhadap kesempatan dan respon inovatif yang dilakukan oleh segolongan orang(elit) tertentu terhadapnya adalah karakteristik dari masyarakat yang berhasil membangun perekonomiannya menjadi perekonomian yang maju inilah yang oleh Mc. Clelland disebut sebagai “*Response Structure*” yang menjadi kunci dari dinamika pertumbuhan ekonomi, yaitu dinamika interaksi antar peluang yang dihasilkan oleh “*Delivery System*” dengan “*Response Structure*” yang menjadi karakteristik dari masyarakat bersangkutan. Dengan demikian apa yang disebut “*Response Structure*” itu tidak lain daripada yang disebut “*receiving mechanism*” oleh herman soewardi. Pemisahan mekanisme (system) perkembangan ekonomi atas kategori “*delivery*” dan “*receiving mechanism*” adalah pemisah yang relative tergantung dari titik tolak pandangan, seperti diungkapkan oleh herman soewardi ketika menyatakan bahwa KUD baru bersifat seperti “*Delivery Mechanism*” dan belum menjadi “*receiving mechanism*”.

Sikap tanggap dan kemampuan suatu kelompok masyarakat untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang di harapkan dari padanya yang merupakan bagian daripada tindakan atau kegiatan masyarakat yang lebih luas, adalah kekuatan social yang menimbulkan partisipasi terhadap sesuatu program atau kegiatan yang berasal dari “atas”, sebagai kekuatan social, sikap tanggap dan kemampuan bertindak tersebut adalah hasil dari suatu proses social tertentu yang terjadi dalam kelompok sebagai suatu system. Sejalan dengan apa yang sudah di uraikan dalam bab pendahuluan, tatanan yang menghasilkan partisipasi itulah yang disebut pola partisipasi. Melihat kedudukan pengertian pola partisipasi ini dalam proses pembangunan, dapat dimengerti apabila dikatakan bahwa pola partisipasi adalah atau tidak lain daripada “*responsive structure*” nya Mc. Clelland dan “*receiving mechanism*” nya Herman soewardi. Andai kata hal itu benar perlu dikemukakan beberapa alasan mengapa istilah pola partisipasi lebih cepat dalam konteks penelitian ini.

- 1) Karena tanggapan (*respons*) yang diantisipasi adalah respons dalam ikatan kelompok, bukan hanya individu anggota kelompok secara sendiri-sendiri.
- 2) Tindakan yang diharapkan adalah hasil dari proses pengambilan keputusan oleh kelompok;
- 3) Bekerjanya “*social control*” dari kelompok, dan
- 4) Sesuai dengan kebutuhan strategi pembangunan.

Meskipun cetusan perhatian terhadap masalah partisipasi ini baru berkembang akhir-akhir ini, secara logika dapat diduga bahwa masalah partisipasi ini sudah dihadapi dan bahkan berhasil dipecahkan oleh masyarakat negara maju

yang menjadi pelopor industrialisasi. Ternyata bahwa masalah besar yang dihadapi oleh para pengusaha (entrepreneurs) pada awal revolusi industri adalah organisasi perusahaan, yaitu sebagaimana perusahaan yang memerlukan modal besar tersebut mendapatkan kepercayaan dari pemilik modal dan bagaimana organisasi besar itu dikelola. Sebagai hasil dari usaha untuk mengatasi kedua masalah tersebut maka berkembanglah ilmu tata buku (accounting), pola dan tata kerja di pabrik serta organisasi perusahaan dan manajemen perusahaan. Tapi sebelum instrumen impersonal tersebut dapat bekerja efektif, maka pada tingkat pertama partisipasi berlangsung melalui dalam interaksi kelompok kecil, dimana para anggotanya saling mengenal secara pribadi (bahkan mungkin bersaudara) dan menjalin hubungan intrapersonal yang akrab atau hubungan "internal system". Menurut Homans dalam bukunya yang berjudul "The genesis of modern management", Sidney Pollard (1965) banyak memberi contoh bagaimana para pengusaha itu berinovasi agar dapat membangun dan mengelola perusahaan berskala besar. Perhatian Pollard memang terhadap manajemen, dimana dia membedakan "Entrepreneur" dengan "manager" dengan menyebutkan "the entrepreneur makes strategic decisions, the managers make tactical ones". Karena berkembangnya kemampuan manajemen itulah akhirnya bisa terwujud partisipasi produktif dari pemilik modal, wirausaha, teknisi dan pekerja untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan pasar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan manajemen adalah kekuatan atau kemudahan yang menumbuhkan kepercayaan dan dukungan dari pemilik modal (partner usaha). Sebagai kesimpulan dari pengkajian yang dilakukannya, Pollard (1965) mengemukakan sebagai berikut :

"It is true that "management" cannot explain industrial progress. Still less the industrial revolution or unique nature of the "take off". It is not the mainspring to the mechanism do diligently looked for in so many quarters in recent years. But its influence on the texture of the new industrialism, on the society created by it, was enormous as far as our evidence goes, it seems to show that "management" was the instrument, if not the originator, of many of the forces which shaped the peculiar forms of rational self-interest, the ambiguities of ownership and control of firms and above all the class relation within industry, which became peculiar to western industrial capitalism. There may be little autonomous causation in the field of management, but it is still worthy of study as a vital instrument through which social forces expressed themselves. With, different management practices, things might have fallen out otherwise"

Kasus yang dikemukakan oleh Geertz tentang penguasaha "santri" di Mojokuto yang tidak bisa memperbesar usahanya karena status sosialnya yg tidak

memberikan kepadanya potensi untuk berpengaruh dalam hirarki struktur masyarakat setempat; dan tentang pengusaha "priyayi" di tabanan (bali), yang punya pengaruh tradisional yang luas tapi terjerat peranan tradisional yang bertentangan dengan kaidah sikap rasionalitas dunia usaha; menunjukkan betapa peluang pertumbuhan ekonomi tidak termanfaatkan oleh karena para pengusaha (entrepreneurs) tidak mampu mengembangkan atau mengelola perusahaan besar, sehubungan tidak adanya kesatuan pola pikir (frame of reference) dari lapisan elit dengan rakyat banyak untuk bekerjasama secara teratur.

Hal ini memberi isyarat bahwa masyarakat yang secara struktural terdiri daripada petani keluarga belahan sempit (peasant society) mengalami kesulitan struktural untuk memanfaatkan peluang dan rangsangan ekonomi, atau "pola partisipasi" dari masyarakat tersebut terhadap sistem ekonomi pasar belum berkembang. Sebagaimana ditunjukkan oleh herman soewardi (1972) bahwa hanya "lapisan atas" yang responsif terhadap peluang dan rangsangan ekonomi, maka tidak adanya struktur dan mekanisme yang menjalin lapisan atas dengan lapisan bawah akan berarti tidak adanya "pola partisipasi" yang ampuh dalam masyarakat tersebut.

Dari pengkajian pollard dapat kita simpulkan bahwa pola partisipasi tumbuh karena adanya kemampuan bekerja sama dalam melakukan usaha atau upaya bersama dalam mencapai sesuatu tujuan, yang perwujudannya memerlukan suatu tindakan oleh banyak orang dalam jangka waktu yang lama dan skala organisasi yang besar. Kemampuan kerjasama (manajemen) itu timbul dari suatu proses belajar yang melibatkan sejumlah orang yang menjadi warga dari sekelompok masyarakat yang merasa bersatu memiliki kepentingan dalam mewujudkan sesuatu nilai yang tertentu dalam suatu kehidupan yang nyata. Jadi proses belajar tersebut adalah proses yang terjadi dalam konteks kegiatan atau tindakan kelompok, yaitu suatu proses untuk menemukan cara berperilaku yang sesuai dengan tata nilai harapan dari kelompok serta mendapatkan hasil yang dapat menghasilkan sasaran yang dikehendaki. Proses belajar adalah juga proses inovatif, karena dalam proses penemuan perilaku yang tepat itu disamping berlangsung suatu proses internalisasi dari tata nilai kelompok terjadi juga pengembangan mekanisme, instrumen atau prosedur tertentu yang meningkatkan kemampuan kelompok untuk melakukan sesuatu dalam menanggapi situasi yang dihadapi. Kelompok sebagai suatu unit kerjasama oleh karena itu dapat dianggap sebagai hasil proses belajar atau hasil dari proses struktural dan interaksi setiap orang secara intensif terlibat dalam proses komunikasi, kepemimpinan dan partisipasi untuk melakukan suatu tugas atau mengusahakan tercapainya sesuatu sasaran atau tujuan bersama. Melalui proses komunikasi, kepemimpinan dan partisipasi itulah terbentuk aspirasi dan perilaku

anggota yang mendukung tercapainya tujuan dan organisasi atau kelompok masyarakat yang lebih luas daripada kelompok tatap muka (kelompok primer).

Dengan pengembangan struktur yang menjadi wadah dari pros komunikasi, kepemimpinan dan partisipasi itu masyarakat yang terserap dalam suatu gerakan massal sejalan dengan apa yang seharusnya terjadi menurut logika dari situasi (dalam hal ekonomi sejalan dengan logika sikap rasional untuk menanggapi situasi pasar). Dan struktur itu dalam kasus ekonomi Inggris pada saat revolusi industri adalah perusahaan yang terpisah dari kehidupan pribadi, yang berskala besar dan yang menerapkan teknologi maju serta yang memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran (spesialisasi) dalam proses pertumbuhan organisasi dan manajemen perusahaan skala besar tersebut, delegasi wewenang dan tanggung jawab serta pengendalian / pengawasan terhadap perilaku orang-orang yang telah diberi kepercayaan, adalah masalah sosial yang dipecahkan oleh para perintis industrialisasi. Dari Pollard kita mendapat petunjuk bahwa masalah tersebut dapat dipecahkan melalui pembinaan hubungan pribadi (kelompok kecil-elit) yang bersamaan cita-cita dan berinovasi dibidang administrasi perusahaan, seperti tata buku, struktur organisasi dan lain-lain. Maka masalah kepercayaan dan kesetiaan secara struktural dipecahkan melalui bekerjanya mekanisme pengendalian sosial (*social control*) dari kelompok dan berkembangnya teknologi manajemen formal yang efektif. Apabila teknologi manajemen biasa kita anggap sebagai suatu metode yang biasa dipelajari dan dialihkan, maka "social control" adalah sesuatu yang hanya biasa tumbuh dari dinamika situasi setempat. Kelompok adalah sarana bagi berkembangnya perilaku anggota yang serasi dengan tata nilai dan situasi yang dihayati bersama oleh para anggotanya.

Melihat fungsi kelompok dalam pembentukan perilaku seseorang dalam organisasi atau dalam komunitas (*community*), maka penjelasan tentang pola partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional berencana dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan teori tentang kelompok sebagai manifestasi perilaku anggota masyarakat, partisipasi berlangsung dalam suatu sistem sosial yang mewadahi, memberi rujukan dan mengarahkan perilaku para anggotanya. Untuk berlangsungnya partisipasi diperlukan kejelasan dari identitas sistem sosial (sub sistem sosial) yang mewadahi, nilai atau norma yang menjadi rujukannya serta prosedur dan sarana yang dipergunakannya. Oleh karena pola partisipasi dalam pelaksanaan program intensifikasi itu berkaitan dengan kelompok tani, maka akan diikuti teori tentang kelompok yang dirumuskan oleh Klein.

Teori Klein tentang kelompok, sebagai suatu system, bertolak dari analisa Bales tentang teori tindakan (*theory of action*) dan parsons tentang system social menurut Bales. Sesuatu tindakan itu apabila dianalisa akan memperlihatkan 6 kategori perilaku yaitu *Communication, Evaluation, Control, Decision, Tension reduction dan Reintegration*. Berdasarkan 6 kategori perilaku dari Bales tersebut, Klein merumuskan suatu kategorisasi perilaku kelompok dalam 3 kategori besar, yaitu *Exspresive Behavior, Adaptive behavior, dan instrumental behavior (Decision Making)*. *Exspresive Behavior* menggambarkan perasaan atau tata nilai yang di hayati. *Adaptive* menggambarkan penyesuaian atau tanggapan atau tanggapan terhadap lingkungan, dan *Descision making (instrumental)* sebagai manifestasi usaha meraih sesuatu tujuan. Ketiga kategori tersebut sejajar dengan ketiga kategori. Psikologik yang di sebut afektif, kognitif, dan konatif (*affective, cognitive, conative*) pada perilaku perorangan, dan dengan *value system, technologycal system* dan *social structure system* dari masyarakat (*society*). Apabila perilaku kelompok kita kaji dengan alat analisa kesisteman tersebut diatas maka setiap tindakan kelompok akan bisa kita pisahkan atas 3 dimensi perilaku kelompok (*expresive, adaptive dan decision making*) berhadapan dengan suatu objek atau subjek dari lingkungan, orang akan merasakan sesuatu alam perasaan (*sentimen*) tertentu yang tersimpul dalam perasaan senang tidak senang, baik atau buruk, tertarik tidak tertarik, berharga tidak berharga, berguna tidak berguna dan sebagainya. Interaksi dalam kelompok akan menghasilkan kesesuaian (*persamaan*) dalam alam perasaan ini, sehingga orang-orang dari suatu kelompok akan memiliki rujukan yang sama. Mereka menghendaki, atau menyenangi atau menghargai sesuatu (yang menjadi obyek perhatian) yang sama.

Adanya perasaan (tata nilai) itu dapat dipandang sebagai daya mampu dari subyek sosial untuk merasakan adanya perbedaan antara apa yang seharusnya atau diharapkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Perbedaan antara kenyataan dengan harapan itu menimbulkan dorongan (*tension*) untuk bertindak. Sebelum sesuatu tindakan dipertimbangkan dan diputuskan untuk dilakukan, kelompok terlebih dahulu berusaha untuk menggali dan menguasai berbagai informasi dan sumber daya yang diperlukan melalui perilaku komunikasi dan evaluasi yang disebut "*adaptive behaviour*" tersebut. Dari perilaku *Adaptive* dan *Exspresive* tersebut kelompok akan memiliki suatu kerangka rujukan (*frame of reference*) yang sama, yang siap untuk dipergunakan dalam menilai alternative tindakan yang perlu diputuskan dalam

perilaku (dimensi) pengambilan keputusan (*decision making*). Dalam kategori perilaku dari Bales terdapat 2 buah kategori, yaitu *control* dan *decision*,

yang kedua duanya termasuk dalam dimensi Decision Making dari Klien. Maka pelaksanaan suatu keputusan oleh para anggota kelompok adalah salah satu fungsi dari kelompok, dalam arti kelompok mampu memberi tekanan agar terjamin ketaatan (loyalitas) daripada anggota.

Dengan dilakukannya tindakan oleh (anggota) kelompok situasi akan berubah, dan bila berhasil akan terjadi apa yang disebut “tension reduction” dan “reintegration” sehingga integritas (keterpaduan) kelompok makin diperkokoh, karena meningkatnya rasa solidaritas dan keakraban. Solidaritas dan keakraban yang berbentuk dari kepuasan atas hasil karya kelompok itu, selanjutnya menjadi faktor yang meningkatkan rasa ketergantungan satu sama lain dan menimbulkan kebutuhan untuk berkomunikasi secara lebih berkelanjutan. Adanya komunikasi yang berkelanjutan dan intensif adalah sarana terpenting dari pertumbuhan kerangka berpikir (Pola Pikir) yang dihayatibersama oleh kelompok. Kesamaan pola pikir tidak lain daripada hasil perilaku ekspresif dan adaptif sebagaimana sudah diuraikan. Demikianlah kelompok ini berperilaku dinamik menanggapi lingkungan dan menyatakan dirinya untuk menjamin kelangsungan hidup serta mewujudkan cita-citanya.

Dinamika kehidupan kelompok yang ditopang oleh perilaku adaptif, ekspresif dan pengambilan keputusan itu, dilengkapi lagi dengan suatu mekanisme yang disebut “latent-pattern maintenance” ialah suatu mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara berbagai dimensi dari kelompok. Apabila mekanisme ini tidak ada, maka kehidupan kelompok bias terhenti karena adanya kegiatan yang tidak seimbang antara dimensi ekspresif, adaptif dan pengambilan keputusan. Kelompok yang mementingkan pergaulan dan keakraban akan mati karena tidak menanggapi lingkungan dan tidak ada keputusan-keputusan yang bias memberi kepuasan. Begitu pula dengan kelompok yang terlalu mengumpulkan ilmu dan teknologi (adaptif) akan mati karena timbul frustrasi dari anggota yang banyak tahu tanpa pernah ada keputusan. Demikian pula kalau terlalu mencurahkan kepada keputusan, akhirnya akan timbul kekurangan puas dan kekurangan informasi atau kemandegan teknologi.

Apabila diatas tadi dilukiskan bahwa pengambilan keputusan itu merupakan salah satu dimensi proses terjadinya tindakan kelompok dan merupakan konsekuensi logis dari telah berlangsungnya perilaku adaptif dan ekspresif yang memberikan kerangka berfikir yang sama (frame of reference), sebenarnya ada satu masalah rawan yang menentukan bobot dan efektivitas dari keputusan kelompok ialah partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena

itu Klein memberikan dua kriteria untuk menggambarkan pengambilan keputusan kelompok ialah pola pikir (frame of reference) dan partisipasi anggota., sehingga menghasilkan empat buah situasi pokok pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Adanya kesamaan pola pikir dan semua anggota berpartisipasi.
 - 2) Tidak adanya kesamaan pola pikir, tapi semua anggota berpartisipasi
 - 3) Ada kesamaan pola pikir, tapi hanya sebagian anggota berpartisipasi
 - 4) Tidak ada kesamaan pola pikir dan hanya sebagian anggota berpartisipasi
- Situasi pertama adalah yang paling memudahkan pengambilan keputusan seperti dikemukakan oleh Klein sebagai berikut :

" the more similiar the member's framies of reference are, the less time it will takes for a group to come to a decision, even when problems with no demonstratrable solutions are in question"

Dalam situasi kedua, keputusan tidak mudah untuk diambil dan akan memerlukan waktu yang lebih lama. Seperti digambarkan oleh Klein sebagai berikut

. "it is at the point of decision that differences show up and prolong the period of decision making. A proposal will be rejected because it does not fit into what a man believes to be the correct perspective . At this point control comes into paly. Some how the members must induce one another to cooperate in the excutionof a task. The process of control aims a getting the members to cooperate even ehen they are not very anxious to do so"

Jadi dalam situasi kedua ini timbul kebutuhan akan adanya pengaruh mempengaruhi antar anggota, yang menjadi kekuatan pengaruh bagi terbentuknya kesepakatan dalam pengambilan keputusan

Untuk situasi ketiga , yaitu dimana terdapat kesamaan dalam pola pikir tapi hanya sebagian dari anggota yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, Klein memberikan penjelasan sebagai berikut .

" whenever members share a common frame of reference the they will be friendly. We have noted that hightly-knit groups of freinds can makes demand upon one another that would be resented in control exercised in such groups is not experienced as an external constraint. It is an imperceptible control. Operating through internalised standards, and it brings hig status for member who best exemplifies those standards."

Situasi yang paling sulit dalam pengambilan keputusan ialah apabila tidak ada kesamaan dalam pola pikir dan hanya sebagian anggota tertentu yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam situasi demikian ini Klein memberikan gambarab sebagai berikut.

" in many circumstances the leader or the ruling elite may have norms different from those of other members of the group. In such circumstances differences in status will obviously lead to misunderstanding because the leaders perspective is not understood by the members. Whether a given information is understood by his recipient depends therefore on the frames of reference of communication. Moreover, if there is disagreement about norms, there will be disagreement about proper course of action. Control will be resented because the restriction on one's freedom of action is felt to have been imposed from outside. In such situation, communication is likely to be inefficient, and at the same time commands and proposals will be felt to spring from the arbitrary authority of the leader and not from the logic of the situation although in the leader's eye of course they may do so. –

Dalam situasi yang terakhir ini peranan pimpinan sangat besar di dalam proses pengambilan keputusan. Pimpinan clan organisasi atau komunitas dapat menampilkan kepemimpinan dengan berbagai jalan antara lain

- 1) *The leader may exercise control through his lieutenants. By this means he is able to preserve both his power and his popularity.*
- 2) *Where there is no shared frame of reference, decisions are most quickly reached in a highly centralized group, where central members have sufficient knowledge, influence or trust to carry out their decision regardless (of the state of opinion in the group).*
- 3) *There demand for urgent action tends to put the weight of decision making on the shoulders of those highly thought of in the group. Dan selanjutnya, the structure will become more centralized that high-status members can take upon themselves, the task of evaluation and decision. In this way the number of members that have to be persuaded of the correctness of value judgement will be reduced and this aspect of the task will take less time.*
- 4) *Members themselves seem to sense that leadership is different in the larger group—they expect the leader to be more autocratic and even, more arbitrary. Thus the fact that agreement is more difficult in the larger group is offset by the fact that an oligarchy tends to develop in any case and this reduce the number of members who have to be consulted when proposals for action are being considered.*

Demikianlah telah kita ikuti garis-garis besar dan teori perilaku, (dinamika) kelompok yang dirumuskan oleh Klein, dengan bertolak dari teori Bales tentang "action" dan Parsons tentang sistem sosial. Dalam kerangka teori kehidupan kelompok sebagai suatu sistem yang menampilkan tiga dimensi perilaku (ekspresif,

adaptif dan pengambilan keputusan). Klein juga melihat bahwa masyarakat (society) tersusun atas tiga sistem utama yaitu Sistem Tata Nilai (Value System), Sistem Teknologi (Technological System-Economy) dan Sistem Struktur Sosial (Social Structure System). Salah satu fenomena sosial yang banyak menarik perhatian para ahli adalah perubahan sosial (Social Change) dan tentu saja suatu teori sosiologi yang mendambakan dirinya sebagai disiplin yang menggarap peristiwa-peristiwa sosiologik tidak akan lupa menghubungkan

sehubungan dengan perubahan teorinya dengan perubahan sosial ini. Klein menjelaskan sebagai berikut

It is useful to distinguish between two kinds of changes namely those introduced into the system in response to changes from the outside initially manifested through the adaptive phase in small groups, and changes through internal logic by the process involved in latent-pattern maintenance

Mengenai desakan (impetus) untuk perubahan sosial, Klein mengatakan

They are all three value technological, and social structure penulis) located in the minds of men and men may wish to keep than congruent with one another. This may produce a powerful impetus to change, for instance, if the value system countenances a distribution of power different from that perceived in the social structure. Since all three systems develop through internal logic as well as in response to external impact, adjustment have constantly to be made to keep them congruent. Thus the changes which one system might originate in others may be inhibited or slowed down because of the inability of the other systems to absorb such a change."

Tentang tingkat kecepatan perubahan dari ketiga sistem itu disebutkan bahwa yang mudah dan cepat berubah adalah sistem teknologi (dengan internal logic), sedangkan sistem nilai dan sistem struktur sosial lebih lambat. Berkaitan dengan pembahasan kita tentang pola partisipasi, maka perubahan yang terjadi pada pola piker

Struktur sosial adalah perubahan yang sangat erat hubungannya dengan berkembangnya pola partisipasi untuk menerapkan sesuatu nilai dalam perilaku orang secara konsisten umpamanya dalam proses pertumbuhan ekonomi pasar dan ekonomi subsistensi diperlukan perubahan nilai relatif (hirarkhi dan keuntungan ekonmi (uang) dcngan nilai guna langsung dari pangan Sedangkan perubahan sistem struktur langsung berhubungan dengan pembentukan kemampuan untuk melakukan usaha dan kegiatan yang diperlukan untuk memanfaatkan sistem

teknologi ke arah realisasi nilai yang diinginkan Terhadap perubahan sosial yang ditimbulkan oleh pengaruh luar. yang bisa masuk melalui ketiga sistem tersebut, Klein menjelaskan bahwa efektivitas dari pengaruh itu tergantung dari kelakuan (rigidity), isolasi dan keselarasan (congruent) sistem sosial yang bersangkutan Tentang peranan dari kelakuan (rigidity) tersebut Klein menyebutkan

" In a rigid system with large number of inter-connections and a relatively small difference between centre and periphery, few changes are likely to be accepted and strong outside stimulus will either have no impact or entirely disrupt the system. In a more loosely organised system. weaker stimuli to change will have effect. and a strong stimulus will produce changes without disrupting the system.-

Bahaya lain bagi kelangsungan hidup sesuatu kelompok (sebagai sistem atau sub sistem) datang dari sifat isolasi antara berbagai sub sistem yang terkait dengannya. Dalam hal ini Klein menjelaskan

As the increased isolation of the groups means that interaction of sentiment takes place largely within the groups and those for survival between the groups, the group that have power thinking in terms of its own survival values, may tend to exploit the other group. The meaning of these new relationships may not be immediately perceived. for the value system may change rather slowly. When however, the value system is sufficiently changed-for men to articulate about the new experience, but unable to change the system, an explosive change may occur".

Sedangkan mengenai peranan keselarasan (congruence) sebagai manifestasi dari "the right- and - proper - place - concept" dalam proses perubahan sosial digambarkan oleh Klein sebagai berikut:

"We have said that power ranks the groups in hierarchy. But in a stable society power is sanctioned by the value system which accords to each groups the right and proper position which it ought to take."

This right-and - proper - place concept in its turn is related to the technological and more particularly the economic system, in that there may be a limiting factor determined by the replacement value of the group if contribution were withdrawn .

Perkembangan teknologi menyebabkan peranan sesuatu kelompok lebih menonjol dibandingkan dengan kelompok lainnya dan kenyataan itu mungkin berbeda dengan yang menjadi norma berlaku pada saat tersebut Di sinilah timbulnya masalah dalam keselarasan masyarakat dari perubahan teknologi Dalam hubungan ini kami kutipkan dari Klein selanjutnya sebagai berikut

Again, as elements in the technological system become more refined and especially when such refinement is greater in one group than in another, it will affect the weight accorded in the value system to such element, or to proficiency, in the technological system as a whole. This will facilitate the perception that the position accorded to a group in value system is incongruous with its actual power, and the rightness and propriety of the existing hierarchy may be questioned. It depends, however, on the value system whether contribution in the technological system is regarded as its just criterion of rank in the social structure system. But the value system is itself susceptible to change. though changes in it may be slow.-

Dengan teori kelompok dari Klein, perkembangan sistem perusahaan besar (dengan teknologi pengelolannya) dapat dijelaskan sebagai hasil dari proses kegiatan kelompok. Dengan adanya sekelompok orang yang mempunyai cita-cita (idaman, nilai) untuk memproduksi secara besar-besaran yang terdiri dari pemilik modal, pengusaha/wirausaha dan teknisi yang berinteraksi secara intensif, terbentuklah pimpinan perusahaan (oligarchy) yang menjamin modal, teknologi, pimpinan dan kewibawaan untuk mengedalikan pekerja yang jumlahnya banyak, kelompok kecil (elit) perusahaan itulah yang berinovasi mengembangkan instrument manajemen. seperti, struktur organisasi pabrik atau perusahaan, tata buku, hubungan perburuhan, latihan dan lain-lain. Dalam kelompok kecil itulah terjadi, proses penyeragaman dan nilai melalui interaksi akrab (persahabatan atau solidaritas) yang dilengkapi dengan terjadinya komunikasi untuk memperkaya pengetahuan atau informasi, tentang teknologi untuk melakukan tugas. sehingga kelompok kecil ini, menjadi kelompok mempunyai kesamaan pola pikir serta intensitas partisipasi yang dalam pengambilan keputusan yang tinggi. Dalam tata nilai budaya masyarakat (Inggris) pada masa itu kelompok kecil pimpinan perusahaan itu merupakan suatu golongan yang mampu dan syah mempergunakan jasa golongan lain (buruh) untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya tidak adanya kesamaan pola pikir pada pihak buruh (karena tidak terbentuknya kelompok) telah merupakan kemudahan bagi tercapainya gaya kepemimpinan otoriter yang lumrah pada waktu itu. Maka dapat dikatakan bahwa tumbuhnya kemampuan mengelola perusahaan besar adalah hasil dari kemampuan berkelompok dari sejumlah kecil elit perusahaan. yang terikat oleh kesamaan kepentingan dan cita-cita yaitu untuk mendapat keuntungan besar dengan pengorbanan kecil. Dalam abad ke-20 ini ditemukan suatu kenyataan bahwa produktivitas para pekerja juga dipengaruhi oleh perilaku berkelompok dari para pekerja. Penemuan di Hawthorn. Western Electric Company, Chicago pada tahun 1924 menghasilkan suatu pandangan baru tentang fakto-faktor yang mempengaruhi

produktivitas tenaga kerja , seperti dikemukakan oleh Gibson (1969) sebagai berikut:

".....that the worker werw members ofclosely knit work groups had established acceptable pattern of behavior for the members These pattern of behavior, in turn. were based on the sentiment of the members of the group, but these sentiments were easily disguised and difficult to isolate " Selanjutnya dikemukakan *"The findings of the Hawthorn studies challenged the basic assumption of earlier organization theory namely the social isolation of the worker and the primacy of economic incentives.-*

Alhasil kelompok adalah inti dari proses pembentukan perilaku anggota masyarakat. baik dalam kaitan dengan organisasi khusus (perusahaan). komunitas atau masyarakat besar (society) Maka terbentuknya kemampuan mcnanggapi sesuatu situasi lingkungan secara produktif atau tumbuhnya pola partisipasi selalu berkolerasi dengan kemampuan dan perilaku berkelompok dari masyarakat yang bersangkutan.

2.1.1.2. Partisipasi Dalam Perspektif Diakronis

Dari uratan terdahulu dapat disimpulkan bahwa Pola Partisipasi adalah suatu respons masyarakat yang melembaga atau berstruktur (yang merupakan manifestasi dari kemampuan masyarakat tersebut) untuk

Menanggapi setiap kesempatan atau tantangan yang timbul Melalui cetusan inisiatif sebagai (seorang sekelompok) warganya yang mendapat dukungan kerjasama atau sekurang-kurangnya pengertian positif (legitimasi) warga masyarakat lainnya (luas), tanggapan itu tampil sebagai perilaku masyarakat yang konsisten dengan tata nilai yang dijadikan dasar penilaian oleh masyarakat yang lebih luas. Dalam sistem ekonomi pasar (pertukaran) yang bertumpu kepada bekerjanya motif ekonomi untuk mendapatkan hasil usaha (keuntungan) sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. pola partisipasi itu berarti timbulnya mekanisme penyesuaian kegiatan produktif masyarakat untuk memenuhi permintaan pasar yang selalu berubah. Mekanisme penyesuaian kegiatan produktif tersebut dimungkinkan oleh adanya struktur dan prosedur kerjasama dalam bentuk organisasi dan manajemen perusahaan berskala besar (terpisah dari rumah tangga keluarga) yang cocok dengan persyaratan teknologi untuk produksi massal dan kaidah ekonomi rasional komersial. Kesempatan dan tantangan. dalam bentuk informasi atau situasi lingkungan. sampai kepada sekelompok masyarakat (komunitas) melalui sesuatu saluran yang kita sebut "delivery syrtem-. sebagaimana sudah diuraikan terdahulu. Melalui saluran -delivery system" itulah terjadinya mobilitas dari sumber daya, teknologi. informasi, barang, jasa dan modal, sehingga bisa sampai kepada

masyarakat yang membutuhkan atau mempergunakannya. Maka “delivery system” adalah jaringan (sistem) penghubung untuk menjalin hubungan timbal balik dari berbagai sub sistem dalam masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat tumbuh menjadi suatu kesatuan sistem yang terpadu. Oleh karena posisi berbagai kelompok masyarakat dalam jaringan hubungan timbal balik itu, berbeda bobot dominasinya, maka jaringan penghubung itu memberikan indikasi adanya pemusatan pengaruh pada sekelompok (segolongan) masyarakat atau komunitas dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan perkataan lain jaringan penghubung adalah sarana untuk terjalinnya hubungan timbal balik antara berbagai sub sistem dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan struktur yang menjadi kerangka keterpaduan dari padanya. Hubungan itu sendiri terjalin melalui kelembagaan khas, merupakan tata cara yang syah dalam melakukan sesuatu tindakansesuai dengan tata nilai yang dianut, seperti jual beli, perburuhan, gotong royong, persewaan, pinjam meminjam dan lain-lain. Disamping berbentuk pramata, kelembagaan itu juga menyatakan dirinya dalam bentuk organisasi yang menjadi wadah bagi terselenggaranya sesuatu tindakan yang melembaga seperti perbankan untuk simpan pinjam, koperasi untuk kerjasama ekonomi dan lain-lain.

Dengan mempergunakan konsep Pola Partisipasi, Jaringan Penghubung dan Pusat Pengembangan (posisi Dominan) sebagai peralatan analisa, kami akan mencoba melakukan evaluasi dari perkembangan ekonomi Indonesia sepanjang sejarah dengan fokus pengungkapan perkembangan pola partisipasi masyarakat pedesaan. Sebagaimana sudah disinggung dalam pendahuluan, perkembangan ekonomi Indonesia itu telah mengantarkan Indonesia kepada ekonomi dualistik, suatu struktur ekonomi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dinamik yang diharapkan. Ekonomi dualistik menggambarkan ketidak terpaduan sistem ekonomi nasional, di mana masyarakat pedesaan yang hidup dalam sistem ekonomi tradisional (yang statik) berdampingan dengan sistem ekonomi “modern” yang menjadi dasar dari masyarakat nasional. Dapat dikatakan bahwa antara masyarakat nasional dengan masyarakat pedesaan tidak terdapat kesatuan pola pikir (frame of reference) dalam bidang (sistem) ekonomi, yang mengakibatkan perbedaan perilaku ekonomi dari kedua golongan masyarakat tersebut. Masyarakat nasional yang secara ekonomi tidak berakar di masyarakat pedesaan, atau masyarakat pedesaan yang tidak mampu menanggapi acuan masyarakat nasional adalah suatu manifestasi dari adanya kelemahan dalam pola partisipasi, pusat pengembangan dan jaringan penghubung (salah satu, beberapa atau semuanya sekaligus) dan masyarakat tersebut

Menurut Geertz, timbulnya masyarakat dualistik itu adalah akibat dari politik (ekonomi) yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda yang

membangun perekonomian Indonesia(HindiaBelanda waktu itu) semata-mata untuk memperkuat perekonomian negeri Belanda dan bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Masa yang menentukan terhadap lahirnya ekonomi dualistik itu menurut Geertz adalah dari tahun 1619 sampai tahun 1942,pada masa dimana penjajah Belanda "menumpangkan" perekonomian kolonial mereka. Dalam hubungan ini dikutipkan apa yangdituliskan oleh Geertz sebagai berikut

Apa yang pada dasarnya dilakukan oleh Belanda dari tahun 1619 sampai tahun 1942 adalah mencari produk pertanian dari Indonesia,khususnya Jawa,yang dapat dijual dipasaran dunia tanpa merubah struktur ekonomi pribumi secara asasi. Negeri Belanda tak pernah berhasil mengembangkan ekonomi ekspor barang pabrik, tidak sedikit pun dapat dibandingkan dengan ekonomi Inggris (lebih-lebih sesudah usaha raja William I untuk menyatukan kembali Belgia dengan Belanda tidak berhasil) dan karena itu kepentingan Belanda di Indonesia tetap hampir sepenuhnya bersifat perniagaan sampai pada akhir kekuasaannya"

Pernyataan yang menunjukkan bahwa berdagang adalah maksud utama kolonialisme Belanda, dikemukakan pula oleh Burger (1960) sebagai berikut

"Bukan saja hanya orang-orang Belanda, melainkan juga orang-orang Inggris dan Perancis mula-mula tidaklah mempunyai maksud lain daripada berdagang, tetapi sebagai akibat daripada kesulitan-kesulitan yang timbul di daerah-daerah yang terpecah belah atau lemah pemerintahannya, maka mereka terpaksa, meskipun hal itu tidak dikehendakinya, menanamkan kekuasaannya. Kebanyakan mereka melakukan hal itu dengan segan-segan karena memerlukan biaya yang sangat besar"

Berbeda dengan Geertz, dengan jelas pernyataan Burger itu bernada membela kaum kolonial (Belanda dan lain-lain), sebab pada bagian lain dari bukunya diceritakan bagaimana fungsionalnya kekuasaan pada waktu itu untuk dapat melakukan perdagangan dengan menguntungkan. Hal ini jelas tersimpul dari pernyataan Burger yang berikut ini :

"Di samping itu, berangsur-angsur kompeni memperluas kekuasaan kenegaraan untuk mengawasi apakah persetujuan- persetujuan yang diadakan dengan raja-raja Indonesia ditaati yang di antaranya menyebabkan penyerahan daerah-daerah kepada kompeni Dengan demikian kompeni kecuali mendapatkan pengaruh ekonomi, juga memperoleh pengaruh kenegaraan yang besar."

Dengan dasar kekuasaan politik (kenegaraan) itulah Belanda (sejak kompeni sampai pemerintah Hindia Belanda) mengembang- kan rencana besarnya, yaitu mengeruk keuntungan dari memperdagang-kan hasil-hasil pertanian Indonesia di pasar dunia. Apa yang dilakukan oleh Belanda untuk melaksanakan rencana besarnya itu dan bagaimana perilaku masyarakat Indonesia (terutama Jawa) dalam

menanggapi politik ekonomi Belanda tersebut merupakan pengalaman sejarah yang dapat dijadikan contoh dari tumbuhnya pola partisipasi masyarakat terhadap rencana yang diturunkan oleh penguasa kepada rakyatnya.

Sebelum mengkaji apa-apa yang terjadi pada masa kolonialisme Belanda itu, perlu dikemukakan sedikit tentang struktur masyarakat Indonesia (Jawa) sebelum Belanda masuk dan kemudian menancapkan kekuasaannya. Menurut Burger pada masa kerajaan Kediri lama, Majapahit dan Negeri-Negeri Pesisir abad ke 15 dan ke 16 masyarakat di Jawa terdiri dari tiga golongan, ialah masyarakat desa yang sebagian besar dapat memenuhi kebutuhan sendiri, lapisan atas (raja-raja dan bangsawan) yang mewajibkan petani bekerja dan menyerahkan hasil usahanya (sebagian) kepadanya, dan golongan pedagang atau pelayaran laut.

Tetapi pada masa kerajaan Mataram yang berhasil menghancurkan kerajaan-kerajaan pantai yang berorientasi ke perdagangan laut, masyarakat Jawa hanya mengenal masyarakat desa yang mencukupi kebutuhan sendiri dengan raja-raja dan kaum bangsawan sebagai lapisan atas. Gambaran perbandingan struktur masyarakat antara Majapahit dengan Mataram, dapat lebih jelas dilihat dari kutipan pernyataan Burger sebagai berikut:

Dalam abad ke 14 Majapahit di samping mempunyai desa- desa yang dapat mencukupi kebutuhan sendiri, mempunyai juga suatu perdagangan laut dan suatu kebudayaan keraton yang berpandangan internasional. Selain daripada kota-kota keraton (hofsteden), Majapahit mempunyai juga kota-kota dagang di pantai" Dan tentang Mataram disebutkan sebagai berikut:

Zaman Mataram yang mulai sekitar tahun 1600 di samping mengenal desa-desa yang dapat mencukupi keperluan sendiri, hanya mengenal pula kebudayaan keraton. Mataram hanya mempunyai kota-kota keraton yang semata-mata merupakan pusat konsumsi dan lebih jauh ke pedalaman letaknya daripada kota-kota keraton dan kota-kota dagang pesisir di Jawa Timur. Di samping kehidupan desa hanya tinggal kehidupan keraton yang tersendiri dan terpisah dari segala hubungan internasional."

"Keadaan ini bagi peradaban Jawa mempunyai arti penting sekali, sejak abad ke 17 kebudayaan Jawa berpaling dari yang dunia luar, membalik ke dalam, dan semata-mata menuju kepada mempertinggi dan memperhalus kehidupan keraton. Pemusatan kaum bangsawan dalam keraton memperkuat hal itu. Sifat keningratan kebudayaan Jawa rupanya bukan baharu timbul pada waktu itu, tetapi ia mencapai suatu tingkat yang tinggi."

Hubungan ekonomi antara lapisan atas (raja, bangsawan) dengan masyarakat desa dilakukan melalui pranata penyerahan wajib dan praktis tidak ada perdagangan dan uang, sehingga struktur masyarakat feodal yang aristokratik dan

berat sebelah itu, di mana tidak ada golongan penduduk kota (yang senantiasa terdapat di India, Tiongkok, dan Jepang) telah membawa malapetaka berupa hampir hilangnya tradisi ekonomi dari masyarakat Jawa.

Tentang masyarakat desa yang disebut mencukupi kebutuhannya sendiri itu yang merupakan satu satunya lapisan masyarakat yang bergerak di bidang produksi, Burger menjelaskan sebagai berikut

Di dalam pergaulan hidup desa itu kebutuhan akan organisasi ekonomi sedikit sekali. Kebutuhan itu dicukupi terutama oleh tolong menolong. Karena itu alat organisasinya terutama terdiri dari ikatan komunal, yakni persaudaraan antara penduduk-penduduk desa dan rasa tunduk mereka kepada kepala desa mereka. Rasa tunduk ini disebabkan oleh pendapat masyarakat, sehingga kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai kedudukan sebagai seorang raja.

Dan keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat Belanda berhasil berkuasa di laut dan kemudian menguasai juga (menjadi yang dipertuan dari) kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu di Indonesia (Jawa) tidak terdapat kota sebagai pusat perkembangan ekonomi, jaringan penghubung desa-kota (Keraton) berlangsung melalui rasa tunduk (taat) dan penyerahan wajib (tenaga dan hasil), dan pola partisipasi masyarakat dalam ikatan komunitas (yang pada waktu itu terpisah-pisah). Lapisan atas (raja dan bangsawan) adalah subyek yang melakukan transaksi ekonomi dan perdagangan dengan pihak luar seperti terlihat dari adanya monopoli ekspor beras oleh raja Mataram. Jadi produksi tidak diurus (diorganisir) oleh pengusaha-pengusaha melainkan oleh organisasi pemerintah Indonesia, yang untuk keperluan itu mempergunakan organisasi desa. Demikian kata Burger.

Rencana besar Belanda untuk menjadikan Pulau Jawa sebagai penghasil komoditi ekspor untuk diperdagangkan oleh Belanda di pasar dunia, dijalankan melalui struktur tradisional yang sudah ada itu, yaitu melalui apa yang disebut "ikatan adat yang terdini dan ikatan feodal dan ikatan desa Kompeni dengan mempergunakan struktur itu telah memperkuat ikatan feodal sampai ke desa di satu pihak, sedang di lain pihak telah meletakkan dasar bagi lahirnya ekonomi dualistik (pada waktu itu di satu pihak ada ekonomi penguasa atau pemerintah dan di lain pihak ekonomi desa yang kemudian melembaga). Sebagaimana dikemukakan Geertz, ekonomi penguasa yang ditumpangkan itu (sebagai embryo ekonomi "modern") adalah suatu ekonomi yang berpusat kepada ekonomi negeri Belanda yang juga bersifat agraris. Maka pusat-pusat pengembangan dari sistem ekonomi "modern" Indonesia waktu itu, dengan pusatnya Jakarta, adalah kota-kota pelabuhan transit, di samping kota-kota keraton (Kabupaten) yang tidak mempunyai industri. Kota-kota ini mendapatkan barang dan tenaga yang dibutuhkannya dari masyarakat desa melalui pranata penyerahan wajib yang juga diterima oleh para pejabat kompeni.

Meningkatnya kegiatan pemerintah oleh karena meningkatnya kegiatan untuk mendapatkan hasil dari rakyat telah meningkatkan jumlah priyayi untuk membantu para Bupati dan kompeni. Mereka ini mendapatkan penghasilan dari apa yang disebut apanage, yaitu hak untuk mendapat penyerahan hasil dan tenaga dari sesuatu daerah. Oleh karena kebutuhan hidup para priyayi itu tidak sepenuhnya bisa dipenuhi dengan penerimaan natura (barang dan tenaga) dari masyarakat desa, mereka juga perlu uang untuk membeli barang-barang impor. Maka timbullah persewaan apanage pada orang-orang swasta (kebanyakan Cina). bahkan menurut Burger banyak priyayi yang terlibat dalam utang dengan orang-orang Cina. Oleh karena itu maka lahirlah di kota-kota itu golongan pedagang, yang sekaligus bertindak sebagai rentenir (pemberi kredit), yang jasanya dipergunakan oleh para priyayi untuk menarik setoran wajib dari desa.

Karena hasil masyarakat desa Jawa tidak merupakan komoditi untuk pasar dunia, maka kompeni berusaha untuk menjadi produsen dari beberapa komoditi ekspor yang tidak dihasilkan oleh desa Indonesia. Semula kompeni menempuh sistem perusahaan swasta seperti yang terjadi pada penanaman tebu di sekitar Jakarta. Di sini tebu ditanam oleh orang swasta yang menjadi tuan tanah (tanah partikular) atau penyewa desa dari kompeni, dengan status seperti Bupati. Kemudian di daerah Priangan dilakukan penanaman kopi pada tanah-tanah hutan, yang dilakukan dengan tenaga rodi dan pengurusannya dipertanggungjawabkan kepada Bupati, dengan pengawasan dari pegawai kompeni. Penanaman kopi pada tanah yang belum dipakai oleh rakyat dengan mempergunakan tenaga rodi ini merupakan suatu inovasi. Kompeni yang mempunyai dampak kemasyarakatan yang luas. Para Bupati yang diberi tanggung jawab untuk membangun, memelihara, memungut hasil dan menyerahkan hasil perkebunan kopi tersebut di samping harus mengerahkan tenaga rodi secara kontinu tiap hari, juga harus membangun prasarana jalan dan mengembangkan alat transpor yang diperlukan.

Maka berkembanglah jaringan penghubung (delivery system) yang mendukung ekonomi modern, ialah jalan dan alat transpor. Di samping itu timbul mobilitas penduduk yang pindah karena melakukan rodi di tempat-tempat yang jauh atau karena menghindari roh banyak penduduk yang pindah ke kabupaten lain yang lebih ringan rodinya. Hal ini memperlemah ikatan desa, seperti disinyalir oleh Van Vollenhoven"

Dengan menempatkan Bupati sebagai titik singgung antara kompeni dengan masyarakat Indonesia (Jawa), maka pola partisipasi rakyat terhadap rencana kompeni itu terletak pada organisasi Kabupaten Kekuasaan Bupati adalah kekuatan dinamik yang menentukan dalam implementasi rencana kompeni tersebut. Oleh karena dalam implementasi rencana itu, dipergunakan pranata tradisional, yaitu

pranata penyerahan wajib dari hasil dan tenaga rakyat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para Bupati beserta seluruh kaum priyayi, maka terdapat kesamaan kepentingan antara Bupati dengan kompeni. Adanya campur tangan kompeni itu memperkuat ikatan feodal antara Bupati dengan rakyatnya, sehingga organisasi partisipasi pada tingkat kabupaten itu secara operasional efektif untuk memobilisasi rakyat melakukan apa yang dikehendaki oleh pemerintah (kompeni). Jadi kekuasaan Bupati, yang secara adat merupakan hal yang memang sah, secara wajar akan ditaati oleh rakyatnya dengan semangat pengabdian yang mendalam, sebagai mana layaknya harus diterima oleh para raja. Pengalaman para Bupati dalam pengurusan kebun kopi pemerintah (kompeni) telah menumbuhkan kemampuan mereka untuk memobilisasi masyarakat dalam mengerjakan pekerjaan dalam skala besar dan lingkup kepentingan lebih luas daripada pengurusan rumah tangga Bupati Dan ini dimanfaatkan antara lain untuk pembuatan jaringan jalan umum.

Apabila kompeni hanya meminta tenaga (rodi). maka pemerintah Hindia Belanda dengan "sistem tanaman pakasanya" telah meminta tenaga dan tanah untuk menanam tanaman yang akan dijual di pasar dunia Sistem tanam paksa itu adalah suatu adaptasi dari sistem kompeni dalam abad ke-18, yang diperluas sehingga berlaku pula di daerah "kerajaan" di Jawa Tengah dan Jawa Timur Yang sangat menonjol adalah tanaman tebu, yang berhasil masuk dalam ekologi sawah dalam pergiliran dengan padi Di sini campur tangan pemerintah lebih mendalam lagi, tidak hanya sampai tingkat kabupaten tapi sampai tingkat desa. Maka pola partisipasi masyarakat pun berkembang pada tingkat organisasi desa, dan kekuasaan desa dibandingkan dengan hak petani perorangan atas tanah menjadi bertambah kuat. Hak penduduk (perorangan) atas tanah di daerah-daerah demikian ini mengalami perubahan dari hak milik (menurut adat) menjadi hanya semacam hak pakai saja. Hal ini terjadi karena pemerintah Hindia Belanda sudah menempatkan para Bupati sebagai pegawai pemerintah yang digaji, sedangkan desa masih tetap merupakan suatu "persekutuan hukum" adat, yang mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam pengusahaan tebu, yang memerlukan teknisi dan pengolahan (fabrikasi) yang lebih rumit. organisasi pemerintah tidak lagi bisa mengelolanya tanpa penempatan tenaga teknisi profesional baik untuk tanaman maupun pengolahan hasil.

Perusahaan tebu (gula) membutuhkan kemampuan pengelolaan dan organisasi yang lebih tinggi, yang menjadi alasan bagi bekerjanya perusahaan Pabrik Gula di pedesaan. Dalam kondisi waktu itu perusahaan perkebunan besar tersebut tidak akan bisa bekerja apabila hanya memanfaatkan mekanisme pasar, oleh karena itu dia harus berhubungan dengan pemerintah setempat untuk berhubungan dengan masyarakat desa, yang pola partisipasinya berpusat kepada pengorganisasian menurut garis hirarkhi kekuasaan ikatan tradisional (Bupati. Kepala Desa). Maka

pola partisipasi melalui ikatan tradisional itu tidak hanya berlaku bagi aparaturnya pemerintah, tapi juga bagi perusahaan swasta besar yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat desa. Hal ini telah dirintis dalam sistem sebelumnya telah persewaan atau penggandaian desa atau sistem tanah partikular di mana penerima hak (swasta) mempersamakan dirinya dengan Bupati.

Sementara itu pemerintah tidak pernah mempunyai rencana untuk meningkatkan kesejahteraan para petani (masyarakat desa) melalui usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas usahatani tanaman tradisional yang menjamin penyediaan kebutuhan pokok rakyat. Karena perhatian perekonomian pemerintah yang ditumpangkan itu tercurah kepada komoditi ekspor, perkembangan pertanian rakyat Indonesia mandeg (statis) karena tidak ada perubahan teknologi dan modal. Menurut Geertz inilah penyebab dualisme ekonomi Indonesia yaitu sektor ekonomi modern yang berorientasi kepada ekspor sedangkan sektor ekonomi rakyat (pertanian rakyat) diabaikan bahkan dipersempit ruang gerakannya dengan adanya perkebunan-perkebunan tanaman ekspor yang mengerjakan petani dengan upah rendah dan menyewa tanahnya sekaligus. Karena dalam proses itu telah diperkuat ikatan feodal, yang menjadi sarana bagi partisipasi rakyat dalam ekonomi modern, maka rakyat tidak melihat dalam ekonomi itu suatu perubahan struktural berupa lahirnya pranata atau lembaga baru yang membawanya kepada peningkatan produktivitas. Oleh karenanya pola partisipasi rakyat dalam menangani masalah-masalah usaha taninya sendiri adalah suatu pola partisipasi berskala desa yang lepas dari kepemimpinan nasional, tetapi yang hasilnya harus dibagi untuk menghidupi seluruh anggota masyarakat (termasuk priyayi) Maka masalah pembagian hasil inilah yang segera terasa oleh masyarakat desa. sehingga mereka menanggapi perbandingan yang makin kecil antara hasil yang dibagi dengan penduduk yang harus mendapat bagian, dengan "berinovasi. Dengan demikian pudarlah vitalitasnya, sehingga menjadi statik.

Dengan pola partisipasi yang bertumpu kepada kepemimpinan (kekuasaan) aparaturnya pemerintah (sebagai kelanjutan historik ikatan feodal), maka rakyat tidak belajar (terlatih) untuk menanggapi suatu situasi dengan mengembangkan idea atau kreasi, tapi cenderung untuk menunggu apa yang dilakukan oleh kaum priyayi (feodal) yang menjadi panutan dari padanya. Karena tidak pernah ada inisiatif dari pemerintah di bidang itu, sekurang-kurangnya sampai dicetuskannya politik etik pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20, maka rakyatpun tidak mempunyai pengalaman (pola partisipasi) yang efektif dalam menanggapi sesuatu program yang memerlukan perubahan perilaku, seperti yang diminta oleh proses adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas usahatani Jadi ketika pada akhirnya pemerintah melancarkan sesuatu program untuk meningkatkan

produktivitas usahatani tanaman pangan (beras). maka pola partisipasi yang melembaga adalah pola partisipasi dalam jalur aparaturnya pemerintahan yang bermuara di pemerintahan desa. Memang itulah yang terbukti berlaku pada saat Survei Evaluasi Intensifikasi tahun 1978, yaitu "delivery system" yang bertumpu pada pemerintahan desa. Sedangkan pola partisipasi pada tingkat desa dewasa ini sudah merupakan suatu partisipasi yang bersifat lugas formal. Dan pola partisipasi yang demikian ini telah menghasilkan suatu kurva pertumbuhan produktivitas yang menunjukkan gejala "levelling off dini" sebelum potensi tekniknya tercapai.

Dalam hal tanaman ekspor, rintisan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengerahkan tenaga rodi dan pengambilan sebagian tanah usaha tani rakyat itu, yang semula berada pada pengelolaan langsung aparaturnya pemerintah (para Bupati) kemudian diambil alih oleh perusahaan perkebunan besar (swasta), telah menumbuhkan citra pada rakyat bahwa para pengusaha itu merupakan priyayi yang berhak mendapatkan pelayanan atau pengabdian dari rakyat. Dengan demikian pola partisipasi petani kepada rencana swasta masih tetap bertumpu kepada pola tradisional hubungan priyayi dan tani, jadi bukanlah hubungan kontraktual seperti di masyarakat barat. Sampai sekarang pola hubungan antara perusahaan besar dengan petani dalam perkebunan tebu (Pabrik Gula), yang menyewa tanah rakyat dan kemudian dengan sistem Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) sejak 1975, masih tetap memerlukan campur tangan langsung aparaturnya pemerintah di daerah agar petani mau menerima rencana dan bimbingan yang disampaikan oleh Pabrik Gula.

Seperti juga dalam pola partisipasi pada peningkatan produktivitas usaha tani tanaman pangan (padi dan palawija), maka pola partisipasi petani dalam TRI itu pun berhadapan dengan masalah efektivitas pola partisipasi petani dalam ikatan desa, yang kurang mampu mentransfer teknologi baru secara tepat-guna, sehingga tidak bisa mencapai "technical ceiling" yang dijadikan dasar dalam perencanaan produksi. Apa yang telah dicapai oleh Pabrik Gula melalui pengelolaan langsung tanaman tebu pada tanah sewa, ternyata belum mampu dicapai oleh para petani dalam skala usaha tani keluarga (lahan sempit). Kenyataan ini adalah refleksi masalah pola partisipasi yang dihadapi dalam adopsi (transfer) teknologi baru oleh petani.

Terjadinya involusi pertanian dan "levelling off dini" itu ada hubungannya dengan pola partisipasi, yang menurut apa yang sudah dijelaskan dalam paragraf terdahulu adalah manifestasi kemampuan atau kehidupan berkelompok dari masyarakat. Komunitas (tingkat kabupaten maupun desa) yang mendapat tugas dari pemerintah untuk melaksanakan sesuatu rencana tentunya akan mengembangkan struktur (organisasi) yang relevan dengan tugas tersebut. Bagi Indonesia (Jawa) dalam abad ke-18 dan ke-19 struktur tersebut adalah struktur feodal. Karena adanya

perbedaan kedudukan dan peranan relatif dari warga masyarakat (komunitas) terhadap tugas yang diemban, maka intensitas interaksi di antara anggota masyarakat akan dipengaruhi oleh struktur pelaksanaan tugas tersebut, yaitu intensitas interaksi di antara para priyayi akan meningkat sedemikian rupa sehingga menjadikan mereka suatu kelompok dengan identitas dan solidaritas tersendiri. Interaksi diantara sesama priyayi akan lebih banyak dibandingkan antara priyayi tersebut dengan rakyatnya. Terjadilah gejala isolasi, sebagaimana diuraikan secara teoritis oleh Klein, yang membawa akibat berkembangnya sikap eksploitatif dari sesuatu kelompok yang berhadapan dengan atau berinteraksi dengan kelompok lainnya yang dianggapnya sebagai sarana atau obyek untuk mencapai tujuan (penunaian tugas). Maka dengan tugas-tugas yang makin berat dan pihak pemerintah makin mendalam pula penetrasi dan struktural samar ke pedesaan sengsa di desapun terbentuk kelompok elit yang berinteraksi intensif di antara sesamanya sendiri, dan menganggap rakyat sebagai obyek keberhasilan tugasnya (oleh karenanya juga terhadap kelangsungan hidup mereka).

Dengan perkataan lain terbentuklah kesenjangan sosial diantara pamong desa dan rakyatnya. Dalam suasana isolasi, pergaulan sosial dari kelompok pimpinan dan masyarakat yang dipimpinnya (yaitu di mana interaksi dari "internal system" lebih terarah kepada sesama anggota kelompok sedangkan interaksi "external system" antar kelompok), menumbuhkan suatu tata nilai yang berbeda yang menyebabkan tidak samanya pola pikir (frame of reference). Inilah pangkal daripada dualisme.

Rakyat, sebagai golongan masyarakat yang menjadi obyek, melalui mekanisme kelompok-kelompok non formal yang menjadivadah interaksi "internal system" di antara sesama mereka mengembangkan suatu perasaan solidaritas dan "standar" (norma) perilaku dalam menanggapi lingkungan yang didominasi oleh golongan elit yang berkuasa. Dalam tekanan, solidaritas itu menimbulkan budaya "invoiusi" di mana etika "bagi rata kemelaratan menjadi norma perilaku karena setiap orang (wargakelompok) harus mendapatkan bagian dari hasil dan penyimpang dari norma merupakan ancaman terhadap kelompok secara keseluruhan. Sedangkan standar prestasi yang dijadikan norma pengukuran kurva anggota adalah prestasi yang relatif rendah dengan maksud mengamankan penilaian terhadap anggota yang paling kurang mampu. Hal terakhir inilah yang menimbulkan intervening off dini

Salah satu manifestasi dan etika "bagi rata kemelaratan" itu adalah pola pengelolaan usaha tani dalam unit usaha berskala kecil kurang dan dari 1 hal bahkan di Jawa orang yang memiliki tanah luas tidak berusaha untuk mengkonsolidasi pengelolaannya di satu tangan tapi akan memecahnya melalui pranata penyakapan

menjadi usaha tani kecil yang berdiri sendiri Dan oleh karena pengusahaan usaha tani kecil itu berada dalam suasana berkembangnya perasaan solidantas yang makin intensif karena adanya tekanan dan "atas".maka teknologi yang tepat untuk itu adalah teknologi padat karya yang merupakan mekanisme yang cocok untuk maksud pemerataan pembagian hasil di antara anggota kelompok Dalam kesatuan pemerintahan desa yang sudah merupakan satuan sosial yang berorientasi kepada penunaian tugas(pencapaian tugas atau "task oriented) interaksi antara pamong desa dengan warga desa(rakyatny) adalah interaksi "lugas formal" (atau interaksi "external system" menurut Homans) yang cenderung mengarah kepada penggunaan kekuasaan dan pada kepada penyatuan pola pikir Maka dapat mudah dimengerti bila terjadi suatu proses polansasi di mana dalam perilaku yang berhubungan dengan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. masyarakat desa makin tergantung kepada kepemimpinan dan pamong desa, sedangkan dalam perilaku ekspresif (perasaan, nilai) makin tergantung kepada teman sekelompok di antara sesama warga masyarakat desa yang secara tradisional merupakan tempat tempat pencurahan nilai bersama. Dalam hal ini usaha tani padi yang merupakan obyek kerjasama interaksi sosial yang cukup mempunyai bobot "Internal system" yang dibutuhkan masyarakat. sedangkan bekerja untuk pelaksanaan rencana yang turun dari atas (pemerintahan) merupakan objek kerjasama yang bobotnya lebih berat kepada "external system"

Polarisasi dalam perilaku kelompok yang demikian itulah yang memperlemah kemampuan adaptasi masyarakat desa terhadap perubahan kondisi ekonomi dan teknologi, sehingga dari luar terlihat sebagai sikap yang tidak responsif terhadap insentif ekonomi . Penny (1978) melihat bahwa petani Indonesia tidak memanfaatkan kesempatan ekonomi yang ada untuk memperbaiki tingkat hidupnya dan oleh karenanya menolak pendapat Schultz bahwa petani berbuat rasional dan berusaha mencapai pendapatan maksimum sebagai sumber yang tersedia pada mereka. Penny menyatakan disebagian terbesar Indonesia. petani-petani tidak berusaha mencapai pendapatan yang setinggi mungkin dan tidak pula memberikan respons yang kuat terhadap insentif ekonomi yang adainilah watak masyarakat tani (desa) yang terkena penyakit . "involusi Pertanian Sikap mereka yang tidak responsif terhadap insentif ekonomi bukan oleh karena mereka tidak rasional tapi oleh karena tidak adanya kemampuan kerjasama untuk mengembangkan perilaku baru yang diperlukan untuk menanggapi atau beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang datang melalui kelembagaan jaringan penghubung (delivery system) yang juga Baru. Jadi apa yang diamati oleh Penny (juga Boeke dan Geertz) adalah kenyataan yang merupakan kelemahan dari kemampuan kerjasama, bukan sifat intrinsik masyarakat (desa) Indonesia.

2.1.1.3. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan.

Istilah Pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata *empowerment* mulai ramai digunakan dalam Bahasa sehari – hari di Indonesia bersama- sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” . Sejak istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan saudara kembar yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan. Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti :

- 1) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- 2) Perbaikan kesejahteraan sosial (Pendidikan dan kesehatan)
- 3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- 4) Terjaminnya keamanan
- 5) Terjaminnya hak sesuai manusia yang bebas dari rasa – takut dan kekhawatiran.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata – pranatanya. Menanamkan nilai – nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan bertanggung jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan instirusi – institusi sosial dan pengintegrasianya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata – pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan tetapi merupakan objek dari upaya pembangunannya sendiri. Pendekatan pemberdayaan dapat diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip – prinsip pemberdayaan yaitu :

- 1) Pemberdayaan *partisipatif*, dalam arti selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan yang mencakup :
 - a. Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan – tujuan “orang luar” atau penguasa
 - b. Pilihan kegiatan. Metode maupun tehnik pemberdayaan, maupun tehnologi yang ditawarkan harus berbasi pada pilihan masyarakat.
 - c. Ukuran keberhasilan pemberdayan, bukanlah ukuran apa yang “dibawa” oleh fasilitator atau berasal dari “luar” tetapi berdasarkan ukuran – ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya.
- 2) Pendekatan kesejahteraan, dlam arti bahwa apapun kegiatan yang akan dilakukan, dari manapun sumberdaya dan teknologi yang akan digiinkan, dan siapapun yang akan dilibatkan, pemberdayaan masyarakat harus memberikan

manfaat terhadap perbaikan mutu – hidup atau kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya;

- 3) Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin kelanjutannya. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungannya tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat penerima manfaatnya agar pada suatu saat mereka akan mampu secara mandiri untuk menajutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan

2.1.2. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut bergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah itu. Safi'i (2007) bahwa proses pembangunan daerah pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena pembangunan ekonomi semata, pembangunan tidak semata mata ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah, namun yang lebih luas dari itu pembangunan memiliki prespektif luas, terutama perubahan sosial.

Pradigma baru pembangunan daerah mengandaikan pembangunan yang ada di daerah mencakup hal berikut (Kuncoro, 2004) :

- a. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan pembangunan.
- b. Pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi semata melainkan keberhasilannya juga terkait dengan factor lainnya, seperti sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi, dan lainnya; dan
- c. Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skla priorotas dan memiliki pengaruh untuk menggerakkan sektor lainnya secara lebih cepat.

2.1.3. Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku sekarang ini menekankan kepada pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat. Prinsip – prinsip ini ini tidak hanya diberlakukan pada sistem politik desa saja, melainkan juga termasuk di dalamnya adalah pada pembangunan desa. Pada saat sebelum era reformasi pembangunan desa cenderung bersifat sentralistik atau dikenal dengan istilah top-down development program. Tipe ini mengarahkan bahwa pembangunan desa lebih merupakan inisiatif pemerintah (pusat atau daerah). Pembangunan desa

pada era sebelum reformasi baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa (Bangdes). Selanjutnya setelah era reformasi dimulai pemerintah dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Konsep ini dikenal dengan nama bottom-up development program. Pada periode tahun 2015-2019 pembangunan perdesaan diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Desa menjadi subjek yang secara aktif merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- c) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- d) Pengembangan-pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan kewenangan yang dimiliki oleh desa yaitu kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan hak asal usul. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal.

1. Tipologi Desa

Desa swasmbada merupakan desa memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Prasarana dan sarana yang lebih lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri baran dan jasa. Sektor primer dan sekunder. Tipologi desa dapat dilihat dari beberapa aspek dominan seperti mata pencaharian pokok dan pola interaksi sosial yang terbangun. Dari mata pencaharian pokok dapat ditentukan tipe

desa beserta karakteristik dasarnya. Ada beberapa tipologi yang masih dapat digunakan berdasarkan mata pencahariannya desa (Wahjudin, 2004)

- a. Desa pertanian berlahan basah dan kering, dimana perkebunan dikelola oleh masyarakat, swasta, serta desa nelayan (tambak, perikanan darat, pantai dan laut)
- b. Desa peternakkan, dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian utamanya adalah berternak. Dalam kenyataannya untuk sekarang sangat sulit dijumpai desa yang homogen, meski ada mata pencaharian lain namun beternak menjadi mata pencaharian utamanya.
- c. Desa industri. Tipologi menjadi dalam dua macam
 - Desa industry yang memproduksi alat pertanian secara tradisional maupun modern dengan sistem upah sesuai dengan manajemen masing – masing
 - Desa industry yang memproduksi barang kerajinan, seperti perabot rumah tangga terbuat dari kayu jati, rotan dan bahan konveksi

2. Pemerintah Desa

Dalam Undang – undang RI nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu keasatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Dualisme kelembagaan dan kepemimpinan di dalam desa, yaitu pemerintahan desa dan Lembaga lain sebagaimana yang telah terjadi sejak pemebrlakuan UU RI Nomor 5 tahun 1979. Dualisme ini berdampak buruk bagi masyarakat, terutama pemabatasan dan ketidakjelasan peran Lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Pada kenyataannya seluruh kapasitas, potensi dan sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan disalurkan melalui pemerintah desa.

3. Pemberdayaan Desa

Menurut Wahjudin Sumpeno (2004), pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.

Proses pemberdayaan adalah penyesuaian, budaya, dan kelembagaan melalui reinterpretrasi, reaktualisasi, dan transformasi. United Nations (1956), mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- a. *Getting to know the local community*. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk

perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan lainnya. Mengetahui hubungan timbal balik antara petugas pendamping dengan masyarakat

- b. *Gathering knowledge about the local community*, mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat. pengetahuan merupakan informasi factual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat Pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap ritual dan *costum*, jenis pengelompokkan, serta factor kepemimpinan baik formal maupun informal.
- c. *Identifying the local leadears*. Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan apabila tidak didukung oleh pimpinan atau tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam proses pemberdayaan, factor *the local leadears* harus selalu diperhitungkan karena mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
- d. *Stimulating the community to realize that it has problems*. di dalam masyarakat yang terikat dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, diperlukan pendekatan persuasive agar masyarakat menyadari adanya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- e. *Helping people to discuss their problem*. Memeberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternative pemecahan dalam suasana kebersamaan.
- f. *Helping people to identify their most pressing problem*. Masyarakat dibimbing agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menetapkan skala prioritas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan dasar. Masalah yang paling krusial dan berdampak pada tatanan kehidupan sosial yang lebih luas yang harus diutamakan untuk dipecahkan
- g. *Fostering self – confidence*. Membangun rasa percaya diri masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan. Rasa percaya diri merupakan modal utama untuk membangun keswadayaan
- h. *Deciding on a program action*. Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program aksi perlu ditetapkan berdasarkan skla prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skla prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

- i. *Helping people to continue to work on solving their problems.* pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk perubahan kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
 - j. *Increasing peoples ability for self – help.* Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian agar masyarakat mampu menolong diri sendiri. Keswadayaan menjadi nilai – nilai dasar dalam upaya pembangunan masyarakat.
4. Partisipasi Masyarakat
- Tahun 1997 dalam pertemuan World Bank dan IMF dinyatakan bahwa keikkutsertaan atau partisipasi merupakan agenda pembangunan masyarakat internasional. Dikemukakan beberapa alasan mengapa partisipasi itu penting dalam proses pembangunan desa (Wahjudin, 2004)
- a. Partisipasi dalam praktik yang sederhana telah lama terbangun dalam pemahaman, keasadaran dan kehidupan masyarakat;
 - b. Partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak manusia. Hal ini sulit dilakukan jika perubahan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu yang tidak terlibat langsung
 - c. Pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh hanya dapat dilakukan melalui proses interkasi, kerjasama dan berbagai peran
 - d. Penggunaan sumber daya dan pelayanan bagi masyarakat tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun oleh pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumber daya pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dan kerangka mekanisme pelayanan harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggunaan pelayanan itu
 - e. Partisipasi merupakan suatu proses pelibatan orang lain terutama kelompok masyarakat yang terkena langsung untuk merumuskan masalah dan mencari solusi secara bersama;
 - f. Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang lebih baik, termasuk tujuan, pengetahuan situasi, struktur sosial dan pengalaman menggunakan teknologi untuk kepentingannya
 - g. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dalam program pembangunan, jika ikut terlibat dan bertanggung jawab di dalamnya
 - h. Dalam kehidupan demokratis, secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam

Menurut Keith Davis (dalam Intan dan Mussadun, 2013:34) dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa :

- a. Pikiran, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- b. Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- c. Pikiran dan Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama.
- d. Keahlian, merupakan jenis partisipasi dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan.
- e. Barang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.
- f. Uang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang kalangan atas

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Menurut Slamet (dalam Sunarti, 2003:79), secara teoritis tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lamanya menjadi anggota masyarakat.

Menurut Mohtar dan Chollin (2011:41), di samping pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial-ekonomis juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi. Menurut Rush dan Althoff (2005:167), karakteristik sosial seseorang seperti penghasilan, pendidikan, kelompok ras atau etnis, usia, jenis kelamin, lamanya tinggal dan agamanya, baik ia hidup di daerah perdesaan atau di kota, maupun ia termasuk dalam organisasi sukarela tertentu dan sebagainya, semua mempengaruhi partisipasi politiknya. Selain itu, sejumlah faktor lingkungan juga mempengaruhi hasil tingkat partisipasi seperti apakah pemilihan itu berlangsung pada satu saat krisis, sejauh mana kebijakan pemerintah itu relevan bagi individu, luasnya kesempatan individu dapat mempergunakan informasi yang relevan, sejauh mana individu tunduk pada kelompok penekan (golongan berpengaruh) dalam pemberian suara, dan sejauh mana individu mengalami tekanan yang berlawanan.

Menurut Plumer (dalam Yulianti,2012:10), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- a. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
- b. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
- c. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- d. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
- e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada

Peningkatan perekonomian masyarakat desa adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.¹⁹ Peningkatan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi (economic development) merupakan hal yang paling utama untuk menggerakkan roda perekonomian suatu bangsa. Economic development sebagai pusat pembangunan mengutamakan kawasan pedesaan karena sekitar 70% penduduk Indonesia bertempat tinggal di kawasan pedesaan. Olehnya itu, pemerintah harus memperhatikan pembangunan kawasan pedesaan tersebut . Program dalam upaya pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah seperti mendirikan usaha kecil menengah yang diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi lemah. Akan tetapi, usaha tersebut belum maksimal dijalankan oleh para pegiat ekonomi akibatnya program tersebut tidak mengalami

perkembangan yang signifikan. Pemerintah telah membuat program baru agar perekonomian di kawasan pedesaan ada lembaga yang diharapkan mampu mewadahi usaha-usaha ekonomi pedesaan tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan dapat menaungi/mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat yang telah diprogramkan dan dikembangkan pemerintah bersama masyarakat. BUMDes memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat/keuntungan sehingga dapat memberi kontribusi pada Pendapatan Asli (PADes) yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian daerah pedesaan dan menyejahterakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedesaan secara khusus, dan masyarakat luas pada umumnya. Pemerintah telah membuat lembaga kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat berfungsi untuk mengelola aset ekonomi desa. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menampung kegiatan ekonomi desa sekaligus sebagai independensi negara yang berkembang didalam kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa salah satunya didukung oleh adanya pengelolaan badan usaha milik desa atau BUM Desa. Pembentukan BUM Desa dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah desa. Dengan adanya BUM Desa ini dapat mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, mendorong berkembangnya mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh retener.

2.1.4. Peran BUMDesa

Peranan merupakan aspek apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia akan menjalankan suatu peranan tersebut (Soejono Soekanto 2006 : 212). Peranan yaitu suatu rangkaian perilaku yang teratur dan timbul karena kepribadian seseorang barangkali juga sangat berpengaruh dalam menjalankan peranan yang harus dijalankan. Peranan timbul karena seorang memahami bahwa dia juga bekerja tidak hanya sendiri. Mereka mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlakukan untuk berinteraksi dan juga lingkungan yang luas. Masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau

kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu (Ade Eka Kurniawan 2011 : 9-10). Menurut seyadi, Bumdes memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian desa, antara lain yaitu:

- a) Pembangunan dan pengembangan potensi sertamendorongpenguatan ekonomi masyarakat desa pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
- b) Berperan aktif dalam mengangkat kualitas hidup masyarakat
- c) Memperkuat perekonomian sebagai penguat dan ketahanan perekonomian nasioanl dengan Bumdes sebagai produksinya
- d) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa tersebut
- e) Membantu para masyrakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan juga kemakmuran bagi masyarakat setempat

peranan bisa dikatakan seperti peraturan, konsep dan hak kewajiban sebagai kaidah tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu yang berupa objek atau benda melalui pengalamannya yang wajib dilaksanakan. Interaksi sosial juga kadang kala kurang disadari oleh masyarakat bahwa yang paling penting adalah bagaimana cara melaksanakan peranan tersebut. Tidak jarang bahwa proses interaksi tersebut kedudukannya lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan hubungan yang timpang tersebut dan cenlebih mementingkan satu pihak yang mempunyai hak saja sedangkan pihak lainnya hanyalah kewajiban berkala

2.1.5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menurut UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

“ Badan usaha milik desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnyadimiliki oleh desa mealalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”

Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, ditegaskan bahwa BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Senada dengan itu Maryunani (2008) juga mengemukakan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan

dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Maksud dan tujuan pendirian BUMDesa termuat dalam Permendesa. Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Menurut Seyadi (2003), maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkembangkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa

Sedangkan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber- sumber pendapatan lain yang sah
- b. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa
- c. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa
- d. Meningkatkan kreatifitas berwira- usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Menurut Seyadi (2003) peranan BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasi- nya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pen- dapatan dan kemakmuran masyarakat

2.1.6. Musyawarah Desa Dalam Pendirian BUMDesa

Musyawarah desa dilakukan oleh pemerintah desa dalam pendirian BUM Desa yang diatur dalam pasal 5 ayat :

1. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal , dan transmigrasi tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa
2. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan social budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUMDesa;
 - c. Modal usaha BUMDesa ;
 - d. Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
3. Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa.

2.1.7. Modal dan Kekayaan BUMDesa

Modal BUMDesa menurut undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 135 ayat :

1. Modal awal BUMDesa bersumber dari APBD Desa.
2. Kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham
3. Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat desa.
4. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
5. Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :
 - a. Dana segar;
 - b. Bantuan pemerintah;
 - c. Bantuan pemerintahg daerah; dan
 - d. Aset desa yang diserahkan kepada APB desa
6. Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui APB Desa.

2.1.8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desapasal 136 ayat :

1. Pelaksanaan operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepada desa.
2. Anggaran dasar sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama , tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, orgaanisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
3. Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal
4. Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah desa.
5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala desa.

2.1.9. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa

Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republic Indonesia nomor 4 tahun 2015 dalam pasal 19 menjelaskan tentang klasifikasi jenis usaha BUM Desa. Klasifikasi jenis usaha BUM Desa dalam pasal 19 ayat :

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis social (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umu (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat memanfaatkan sumber daya local dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Air minum desa;
 - b. Usaha listrik desa;
 - c. Lumbung pangan
 - d. Sumber daya local dan teknologi tepat guna lainnya.
3. Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan desa dan teknologi tepat guna.

Selanjutnya pasal 20 ayat :

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa.

2. Unit usaha dalam BUMDesa sbgaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha oenyewaan meliputi : a. alat transportasi; b. perkakas pesta; c. gedung pertemuan ; d. rumah took; e. tanah miik BUMDesa; dan f. barang sewaan lainnya.

Pasal 21 ayat:

1. BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. Jasa pembayaran listrik;
 - b. Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22 ayat:

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/ atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yg lebih luas.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
 - a. Pabrik es;
 - b. Pabrik asap cair;
 - c. Hasil pertanian;
 - d. Sarana produksi pertanian
 - e. Sumur bekas tambang; dan
 - f. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Jenis usaha BUM Desa pada pasal 23 ayat;

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Dalam pasal 24 juga menyebutkan pada ayat:

1. BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagi induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam dkala local desa maupun kawasan perdesaan.
2. Unit-unit usaha dalam BUMDesa sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :

- a. Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
- b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsultasikan jenis usaha local lainnya.

2.1.10. Kelembagaan BUMDesa Pada Prespektif Ilmu Ekonomi

Pada suatu perekonomian yang rumit dan luas, banyak aktor baik individu (secara perorangan) maupun kelompok (secara organisasi) terlibat dalam aktivitas ekonomi dan politik dengan motivasi yang beraneka ragam. Namun dalam perkembangannya (dengan memperhatikan aspek teoritis, yuridis, dan praktis), ternyata aktivitas-aktivitas tersebut sulit untuk diidentifikasi dan dipisahkan secara tegas dan jelas atas ranah dari ketiga sektor dimaksud (publik, privat, dan komunitas). Interseksi antara sektor publik dengan sektor privat memunculkan institusi Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, dan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional melalui penyediaan barangjasa guna mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan (milik negara atau daerah) [menurut UU 5/1962 dan UU 19/2003]. Sedangkan di lingkup desa menurut PP 72/2005, BUMDes nampaknya diarahkan dan dimantapkan sebagai salah satu unit pelayanan usaha mikro atau kecil, karena modal usaha untuk mengembangkan usaha masyarakat desa yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah desa setempat.

2.1.11. Pemberdayaan Sebagai Proses Pembangunan Masyarakat

Subejo dan Narimo (2004) mengemukakan bahwa terminology pemberdayaan masyarakat kadang – kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*), yaitu proses dimana usaha – usaha orang – orang itu sendiri disatukan dengan usaha – usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial, dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat – masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional. Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Lingkungan yang strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga

masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. *Sustainable Development* memasyarakatkan adanya pengelolaan sumberdaya ekologi secara bijaksana oleh warga masyarakat lokal. Dalam hal ini mekanisme ekologi mencakup aspek lingkungan sekitar yang sangat luas bagi masyarakat. Termasuk didalamnya bagaimana masyarakat diberi kesempatan dan didorong untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya ekologi-nya secara berkesinambungan, termasuk di dalamnya fasilitas infrastruktur (saluran irigasi, jembatan, jalan dan fasilitas publik lainnya).

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan fenomena yang ada dilakukan studi empiris dengan menelaah hasil penelitian akan dijelaskan berikut ini:

1. Telah melakukan penelitian mengenai dinamika jiwa kewirausahaan pada usaha kecil yang bergerak dalam bidang layanan jasa. Dengan mengambil lokasi penelitian di Skotlandia Barat, jurnal yang berjudul *Entrepreneurial Dynamics in Small Business Service Firms*. Ini bertujuan untuk menganalisa fakta yang sebenarnya dari dinamika kewirausahaan dan melakukan pelaporan atas hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif. Keith Glancey, Malcolm Greig dan Malcolm Pettigrew (1998).
2. Sebagaimana diketahui bahwa keputusan memasuki suatu pasar melibatkan unsur kepribadian dari seorang pelaku usaha. Hal ini akan menimbulkan kategorisasi antara *Entrepreneur* dan *non Entrepreneur*. Karakter atau kepribadian pelaku usaha meliputi kemampuan menerima resiko (*risk taking*), *locus of control* dan ambisi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini diajukan 3 hipotesis yang berkaitan dengan karakter pelaku usaha dengan keputusan memasuki pasar (*market entry*) : 1) Terdapat hubungan yang positif antara toleransi resiko dengan keputusan memasuki pasar; 2) terdapat hubungan positif antara *locus of control* dengan keputusan memasuki pasar ; 3) terdapat hubungan positif antara ambisi dengan keputusan memasuki pasar. Hasil penelitian yang diperoleh adalah : 1. Tidak terbukti secara signifikan adanya hubungan yang positif antara toleransi dan risiko dengan keputusan memasuki pasar; 2. Terbukti secara signifikan adanya hubungan yang positif antara *locus of control* dengan keputusan memasuki pasar; 3) terbukti secara signifikan adanya hubungan yang positif antara ambisi dengan keputusan memasuki

pasar. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa *game theory* adalah mekanisme yang berguna untuk mempelajari kewirausahaan dan karakteristik pelaku usaha. Dalam penelitiannya, Olson menekankan pada proses simulasi pasar atas keadaan – keadaan yang mungkin dihadapi oleh seseorang wirausahawan, sementara itu dalam penelitian ini berkaitan dengan kondisi riil sebuah usaha. Sementara itu, persamaan antara keduanya terletak kepada penggunaan variable karakteristik pelaku usaha. David E. Olsom (2000)

3. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk menghasilkan : pertama, Model kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa (penjabaran pasal 213 UU No. 32/2004). Kedua, Model organisasi dan manajemen BUMDesa. Ketiga Model fasilitasi yang terdiri dari (a) partisipasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi, (b) Pendampingan usaha, dan (c) pola kemitraan eksternal terhadap Lembaga keuangan (bank, koperasi, atau penanam modal), dan mitra usaha lainnya. Hasil Penelitian menghasilkan : 1) Model Kelembagaan bagi pemberdayaan masyarakat desa, karakteristik BUMDesa sebagai sebuah institusi di dalam memberdayakan masyarakat adalah berbentuk Badan Hukum ini menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, menjadi salah satu sumber pendapatan desa dan memberikan layanan pada masyarakat desa; 2) Model organisasi dan manajemen, adanya aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDesa, mendisain struktur organisasi, menyusun job diskripsi, menetapkan system koordinasi, menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga, menyusun pedoman kerja organisasi BUMDesa, menyusun system dan administrasi dan pembukuan, melakukan proses rekrutmen, menetapkan system penggajian dan pengupahan; 3) model fasilitasi, BUMDesa sebagai suatu Lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDesa harus bersumber dari partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDesa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bukan melalui pihak ketiga. Sayuti (2011)
4. Hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan BUMDesa sangat berkontribusi sebagai penguatan ekonomi lokal yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mekamurkan kepentingan masyarakat desa dan juga bagi pendapatan asli desa. Kontribusi dalam sumber – sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa dapat diberikan berupa pelayanan, namun rendahnya produktivitas pelayanan desa disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia dibidang manajemen dan lain – lain. Sehingga BUMDesa di

Lindungsari belum dapat dikatakan memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa. Kemudian dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa BUMDesa mempunyai kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, badan usaha milik desa ini masih belum berhasil. Karena dengan target sebagai penguatan ekonomi desa, BUMDesa tersebut manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat saja. Selanjutnya, kontribusi BUMDesa ialah sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan tidak hanya bergantung kepada anggaran dana desa. Namun dari fenomena yang terjadi di Lindungsari, BUMDesa belum berkontribusi penuh sebagai Lembaga yang bergerak di bidang ekonomi. Ramadana et al (2013)

5. Salah satu untuk mensukseskan pembangunan di desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa. Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh BUMDesa dalam mengelola dan memaksimalkan aset – aset yang ada di desa. Strategi digunakan oleh BUMDesa Sekapuk Kecamatan Ujungangkah Kabupaten Gresik meliputi strategi pengembangan produk, penetapan harga dan strategi keuangan. Dalam kegiatan control pelaksanaan BUMDesa dilakukan oleh kepala desa yang merupakan pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah kabupaten. Adapun faktor pendukung dari pelaksanaan strategi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDesa di Desa Sekapuk adalah belum adanya pemasok air bersih di desa sekapuk sehingga dengan keberadaan layanan PAM sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Faktor penghambat dari strategi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDesa di desa Sekapuk yaitu mengenai kesulitan dalam melakukan pengembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk local, kurangnya sarana pemasaran, terbatasnya dana dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Gresik maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Strategi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDesa sekapuk telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa di tahun 2010 – 2012. Namun masih ada yang harus diupayakan oleh BUMDesa Sekapuk misalnya membuat sarana pemasaran seperti website yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat desa maupun masyarakat di daerah lain untuk mengenal produk layanan dari BUMDesa di desa Sekapuk. Selain itu ada baiknya apabila di Website tersebut berisi potensi – poyensi yang ada di desa Sekapuk seperti gunung kapur, karena gunung kapur yang berada di desa

- sekapuk memiliki potensi apabila kedepannya dijadikan sebagai objek wisata. Hayyuna et al (2014)
6. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Tujuan penelitiannya mendiskripsikan pentingnya keberadaan BUMDesa dan pengelolaannya guna kepentingan masyarakat desa, merujuk pada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang desa, khususnya UU no 6 tahun 2014, telah menjadi pengaturan yang komprehensif tentang desa. Berbeda dari UU nomor 32 tahun 2004, pengaturan mengenai BUMDesa dalam UU desa yang baru ini lebih lengkap. BUMDesa tetap diposisikan sebagai suatu Lembaga perekonomian desa yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Tata kelola yang profesional dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMDesa berdasarkan peraturan perundang – undangan menjadi prasyarat berjalannya BUMDesa secara baik. Kegiatan BUMDesa yang profesional dan idela dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi loka dan regional dalam lingkup perekonomian nasional, Ridlwan (2014),
 7. Diharapkan dapat mengungkapkan dan menganalisis peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa guna memperkuat dan mengembangkan konsep dan teori yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan. Metode penelitian kualitatif. Sampel diperoleh dari wawancara pada 10 orang informan yang didukung dengan observasi serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan program pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan peningkatan pengembangan usaha telah dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam program pelatihan dinilai oleh pemerintah dan lembaga keswadayaan masyarakat berhasil karena diikuti oleh masyarakat yang diundang. Pemerintah selalu berusaha memotivasi masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media baik melalui pengeras suara di desa, kegiatan sosial kemasyarakatan, maupun kegiatan lainnya yang banyak mengumpulkan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar, kebutuhan sosial. Pendapatan masyarakat baik meningkat maupun menurun secara nyata berhubungan erat dengan kebutuhan hidup dalam pemenuhannya. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten

Minahasa dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yaitu kegiatan bantuan pinjaman modal usaha melalui program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan motivasi bekerja dan berusaha pelatihan serta pelatihan keterampilan usaha ekonomi. Femy M. G. Tulusan , Very Y. Londa (2014)

8. Permasalahan dalam pengelolaan sampah di Desa Tunjuk, Tabanan cukup berat dimana kesadaran dan kepedulian masyarakat masih kurang terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Masyarakat masih membuang sampah sembarangan dan membakar sampah. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan gagasan pemberdayaan masyarakat dengan alternatif solusi berupa edukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Metode yang digunakan yaitu penyuluhan dan penyebaran poster. Penyuluhan mengenai edukasi pengelolaan sampah menggunakan metode SOS (*sort out, saved*) dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) dan memahami peran bank sampah. Kemudian dilanjutkan dengan penyebaran poster pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu meningkatkan motivasi warga desa dan merubah pola pikir mereka mengenai kesadaran lebih peduli terhadap lingkungan dan diharapkan untuk segera membuat kesepakatan dengan perangkat desa untuk membentuk bank sampah guna meminimalisir adanya timbulan sampah. Gagasan dibentuk bank sampah sekiranya dapat membantu mengatasi permasalahan sampah rumah tangga di Desa Tunjuk, guna menumbuhkan kesadaran dalam pengelolaan sampah untuk memperoleh manfaat secara langsung, baik secara ekonomi dan kesehatan lingkungan. Luh Gede Mita Laksmi Susanti, Ni Nyoman Juwita Arsawati. (2014).
9. Hasil penelitian Penelitian berdirinya BUM Des dapat memacu kreativitas masyarakat dan diharapkan adanya prtisipasi masyarakat dengan pemerintah melalui BUM Desa supaya mampu mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat di desa – desa memlalui usaha kecil. Penelitian ini menunjukkan bahwa , individu masyarakat terlibat langsung baik secara fisik maupun psikis dalam kegiatan pemberdayaan, hal ini akan meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan BUMDES. Namun demikina masih banyak desa di Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan yang belum membentuk BUM Desa dikarenakan berbagai kendala yaitu kurangnya informasi manfaat BUM Desa, kurang sosialisasi di tahun – tahun sebelumnya, sumber daya manusia yang belum kreatif, tidak tahu usaha apa yang akan dikelola. Maka tujuan utama Pemerintah adalah memeberikan sosialisasi dan pendampingan kepada Aparat Desa dan Masyarakat Desa. Ulfah (2015)

10. Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa Keberadaan Bum Desa untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan. Melalui BUM Desa diharapkan antar Lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Desa Parakan Salam dan Desa salam Jaya di Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, masih belum mempunyai BUM Desa sebagai Lembaga perekonomian masyarakat. Namun, Jika dilihat dari potensinya kedua desa ini memiliki potensi besar untuk berdirinya BUM desa sebagai penampung kegiatan – kegiatan ekonomi masyarakat dan Lembaga pelayanan public masyarakat. Oleh karena itu, melalui program PKM yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan mengenai pengembangan BUM Desa diharapkan nanti Lembaga yang ada dimasyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Zulkarnaen (2016),
11. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengidentifikasi dan mendiskripsikan pasar desa yang ada di Kabupaten Pasuruan. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan belum optimalnya pengembangan pasar desa. Mengidentifikasi faktor-faktor kelemahan, kekuatan, hambatan dan peluang pasar desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa. Serta menyusun dan merumuskan Strategi Optimalisasi Pasar Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa secara spesifik dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Deskriptif, yaitu analisa terhadap data yang bersifat kualitatif dari hasil diskusi kelompok terfokus. Analisa Kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang berupa pernyataan atau data yang tidak berupa angka. Analisa Kuantitatif, yaitu analisa terhadap data yang berupa angka-angka dan laporan yang berupa data kuantitatif dengan bantuan analisa statistik, untuk menghitung kecenderungan (trend), grafik dan diagram maupun prosentase (%). Hasil Penelitian ini antara lain yaitu Diperlukan Optimalisasi pasar desa yang dapat dilakukan melalui strategi peningkatan pembangunan fisik pasar desa serta perbaikan sarana prasarana yang dibutuhkan, peningkatan kualitas SDM pengelola pasar desa, peningkatan manajemen pasar desa, dan pembinaan pedagang tetap dan PKL di pasar desa. Kelemahan paling mendasar yang harus diatasi sebagian besar pasar desa di Kabupaten Pasuruan adalah skala pasarnya masih kurang ekonomis, lemahnya manajemen pasar dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pasar desa. Model pengembangan pasar desa di Kabupaten Pasuruan, belum mengacu pada

model pasar sehat dan belum memanfaatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan pasar desa. Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie (2016)

12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kondesid itu sangat di butuhkan sehingga bisa memberikan pengaruh atau efek y`ang kuat untuk pembentukan rasa kepercayaan para administrator dan karyawan terhadap pimpinan atau ketua badan usaha milik desa (BUM desa) desa sukarama adalah milik bersama (masyarakat) dengan rasa memiliki desa (sense of belonging) yang baik terhadap BUM desa maka semua meneger dak karyawan desa ikut andil dalam menjaga dan peduli terhadap BUM desa. sementara faktor yang bisa menghambat proses BUM Desa tidak oftimal adalah dikarenakan sumber daya manusia nya . Oleh karena itu kemampuan keterampilan dan potensi para karyawan atau anggota BUM desa sukarama harus di tingkatkan dengan cara memberi pelatihan dan bantuan teknik selain itu juga harus di lakukan pengawasan yang baik terhadap kinerja karyawan BUM desa .adapun yang menjadi faktor penghambat lain nya adalah tujuan yang tidak Konsisten.

Tujuan BUM desa adalah untuk meningkatkan tingkat ekonomi penduduk desa. Tapi tujuan itu tidak akan bisa tercapai di karenakan BUM desa sukarama belum bisa memberikan kontribusi yang lebih terhadap pendapatan masyarakat pedesaan sehingga bidang usaha di BUM desa sukarama belum mengarah pada peningkatan kreativitas penduduk yang bisa mendorong perubahan atau mendorong ekonomi desa. Karlina dan yudiardi (2017)

13. Hasil penelitian di harapkan dapat memperkuat institusi ekonomi pedesaan dalam (1) membuka peluang entitas bisnis sebagai badan hukum yang cendrung berorientasi pada keuntungan ekonomi , sebagai badan usaha yang berusaha memperbaiki pelayanan sesuai kebutuhan dan karekter masyarakat setempat . BUM desa tidak seperti perusahaan, melainkan sebuah lembaga badan layanan umun desa yang merupakan badan pemerintah diluar desa dengan aset yang tidak terpisah sehingga aspeknya tidak terbengkalai oleh pelayanan publik dari pada kenaikan dalam pendapatan anggaran desa (PADes) BUM desa terus menerapkan prinsip tata kelola dan menuangkan peraturan internal fan formal dan peraturan perundang undangan BUM desa. (2) bentuk kerja sama BUM desa dengan institusi lain seperti kerja sama harus difasilitasi dan dilindungi oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah , terutana keberadaan dan keberlanjutan BUM desa yang dapat dipertertahankan. Peran keterlibatan para pemimpin masyarakat dan pemerintah desa harus mempunyai modal sosial tinggi pejabat BUM desa

- untuk meningkatkan kerja sama dengan Pihak lain untuk kemajuan BUM Desa; (3) Kelembagaan BUM Desa di sederhanakan dan selaras dengan hakikat desa sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Hardijono et al (2017)
14. The type of this research is descriptive quantitative with the population of 102 village owned enterprises in asahan regency. The selected sample is 120 business entities. The analytical tool of this research is with multiple regression with of Smart-PLS software. The result show ownership and composition of share of village-owned enterprises not signification the turnover of business entities. Lubis et al (2017)
 15. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran badan usaha milik desa (BUMDesa Podho Joyo) sebagai lembaga ekonomi desa di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. teknik pengambilan sumber data menggunakan teknik Purposive Sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah teori organisasi publik menurut Mardiasmo yakni tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi dan karakteristik anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDesa Podho Joyo sudah cukup banyak berperan dan berkontribusi bagi masyarakat Desa Sukorejo, melalui unit usahanya BUMDesa memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat seperti adanya pasar desa, adanya sistem menabung yang memudahkan melunasi pinjaman, hadirnya aplikasi E-payments, dan harga Lpg yang murah. BUMDesa juga sudah bisa membiayai kebutuhannya sendiri dari keuntungan yang diperolehnya bahkan sudah dapat dikatakan mandiri karena bisa memberikan 15% dari keuntungannya kepada kas desa, selain itu BUMDesa juga sudah dapat mengadakan rekrutmen dan yang boleh menjadi pegawainya hanya warga Desa Sukorejo, namun sangat disayangkan dengan sudah majunya teknologi website BUMDesa yang sudah ada saat ini masih eror dan belum diperbaiki padahal fungsi website tersebut dapat dikatakan penting bagi BUMDesa. Khoirun Nisa' Efend (2018)
 16. The study used statute approach, conceptual approach, and case approach. The conclusions of this study are directed to apply the concepts of strengthening national laws relating to the management of BUMDes in order to strengthen the village's. Winarsi et al (2018)
 17. *The Type of this research is descriptive quantitative with the population of 102 village Ownwd Enterprises in Asahan Regency. The Selected sample is*

102 Bussines entities. The analytical tool of this research is with Multiple Regression with of smart- PLS software. The results show ownership and composition of share of village – owned enterprises not signification the turnover of bussines entities. Lubis et al (2017)

18. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. teknik pengambilan sumber data menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah teori organisasi publik menurut Mardiasmo yakni tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi dan karakteristik anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDesa Podho Joyo sudah cukup banyak berperan dan berkontribusi bagi masyarakat Desa Sukorejo, melalui unit usahanya BUMDesa memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat seperti adanya pasar desa, adanya sistem menabung yang memudahkan melunasi pinjaman, hadirnya aplikasi E-payments, dan harga Lpg yang murah. BUMDesa juga sudah bisa membiayai kebutuhannya sendiri dari keuntungan yang diperolehnya bahkan sudah dapat dikatakan mandiri karena bisa memberikan 15% dari keuntungannya kepada kas desa, selain itu BUMDesa juga sudah dapat mengadakan rekrutmen dan yang boleh menjadi pegawainya hanya warga Desa Sukorejo, namun sangat disayangkan dengan sudah majunya teknologi website BUMDesa yang sudah ada saat ini masih eror dan belum diperbaiki padahal fungsi website tersebut dapat dikatakan penting bagi BUMDesa. Khoirun Nisa' Efendi. (2018).
19. *The conclusions of this study are directed to apply the concepts of strengthen the village's economy in Indonesia and to achive empowermwnt of nural community and reduce corruption that often occurs and harm the economy of the village. Winarsi et al (2018).*
20. Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, saat ini baru membentuk BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat. Jika dilihat dari potensinya, Desa ini memiliki potensi besar untuk berdirinya BUMDes sebagai penampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan lembaga pelayanan publik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali Potensi Desa untuk dikelola Badan Usaha Milik Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode *Community Based Research*, di mana penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: *in-depth interview* dengan partisipan yang menjadi aktor kunci dalam BUMDes, tahap selanjutnya melakukan Diskusi Kelompok berdasarkan kelompok kepentingan yang ada di desa tersebut, dan pada tahap akhir dilakukan Focus Group Discussion dimana diskusi dilakukan oleh

- berbagai pihak yang berkepentingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan potensi Desa yang dapat dikelola BUMDes yang diharapkan dapat membawa perubahan dibidang ekonomi dan sosial. Tarmidzi , 2018
21. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa eksistensi BUMDes Tulus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus melihat tantangan-tantangan yang dihadapi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data model Miles dan Habermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Tulus di Desa Subun Bestobe menggunakan konsep pemberdayaan yakni memberdayakan masyarakat dan potensi lokal yang ada di masyarakat sendiri. Kehadiran BUMDes Tulus sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam menambah pendapatan masyarakat. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes Tulus yakni terkait akuntabilitas, infratstruktur dan sumber daya manusia. Egidius Fkun, (2018)
 22. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2009-2016. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan pengujian asumsi klasik. sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 Kabupaten da Kota . Hasil analisis secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan kedua variabel bebas berpengaruh terhadap Belanja modal Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah. Rendy Armandi Kakasih, George M.V. Kawung, Steeva Y.L Tumangkeng, (2018)
 23. Hasil penelitian bahwa model pemeberdayaan BUMDES adalah melalui Business Plan, Analisis Swot sedangkan solusi pembanguana ekonomi desa melalui prinsip partisipasi, keterbukaan, dipertanggungjawabkan, berkelanjutan dan dinikmati masyarakat. BUMDES dapat mencegah pengangguran, kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli desa (PAD). Azhari (2019).
 24. Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan BUMDES diberbagai tempat, yang nantinya bisa dikembangkan di desa lain. Metode yang digunakan yaitu studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa jurnal ilmiah diambil dengan cara acak, adapun temuan dalam penelitian ini adalah BUMDES bisa menjadi kekuatan baru dalam menunjang

- pembangunan, karena bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan menekan angka urbanisasi masyarakat desa ke kota, kalau tidak desa akan kehilangan populasi penduduk. Dewi (2019)
25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bumdes dalam meningkatkan perekonomian sudah baik dalam pelaksanaannya, dengan berkembangnya Bumdes meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat Desa Manding Laok. Untuk pelaksanaan Bumdes masih perlu diperbaiki pada aspek sumber manusia. Rekomendasi yang diberikan yaitu meningkatkan kualitas pada sumber daya manusia, meningkatkan sumber daya, dan memahami karakteristik pesaing sehingga pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan. Raudhatul Firdaus, 2020.
 26. Fokus penelitian ini menggambarkan bagaimana keberlanjutan pengelolaan BUMDes dimasa yang akan datang, tanggungjawab dari pengelolaan BUMDes dan transparansi pengelolaan BUMDes yang diberikan kepada masyarakat di Pemerintah Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun ada salah satu BUMDes yang belum bisa menyumbang ke PADes dan belum ada remunerasi tetapi masyarakatnya mendukung keberadaan BUMDes dengan jiwa sosialnya yang tinggi untuk ikut andil dalam memajukan BUMDes tersebut dan masyarakat merasa perbedaan sebelum ada BUMDes dan setelah ada BUMDes. Aulia Tafhana Arindhawati dan Evy Rahman Utami (2020)
 27. Camilia, Anwar, Sri, 2020 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: jenis kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan istri nelayan meliputi: pedagang ikan, sembako, serabi, nasi, jajan dan pedagang sayur; buruh cuci, buruh pindang, pembantu rumahtangga, pengasuh anak, penjaga toko, dan karyawan laundry. Istri nelayan memanfaatkan peluang bekerja pada kegiatan ekonomi produktif dengan rata-rata partisipasi 261,31 HKO (71,59%) per tahun. Rata-rata pendapatan rumahtangga nelayan sebesar Rp 162.657.038 per tahun dengan rata-rata kontribusi pendapatan perempuan sebesar 6,72% dari total pendapatan rumahtangga. Camilia, Anwar, Sri, 2020
 28. Permasalahan dalam pengelolaan sampah di Desa Tunjuk, Tabanan cukup berat dimana kesadaran dan kepedulian masyarakat masih kurang terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Masyarakat masih membuang sampah sembarangan dan membakar sampah. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan gagasan pemberdayaan masyarakat dengan alternatif solusi berupa edukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Metode yang digunakan yaitu penyuluhan dan penyebaran poster. Penyuluhan mengenai edukasi pengelolaan sampah

- menggunakan metode SOS (sort out, saved) dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle) dan memahami peran bank sampah. Kemudian dilanjutkan dengan penyebaran poster pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu meningkatkan motivasi warga desa dan merubah pola pikir mereka mengenai kesadaran lebih peduli terhadap lingkungan dan diharapkan untuk segera membuat kesepakatan dengan perangkat desa untuk membentuk bank sampah guna meminimalisir adanya timbulan sampah. Gagasan dibentuk bank sampah sekiranya dapat membantu mengatasi permasalahan sampah rumah tangga di Desa Tunjuk, guna menumbuhkan kesadaran dalam pengelolaan sampah untuk memperoleh manfaat secara langsung, baik secara ekonomi dan kesehatan lingkungan. Luh Gede Mita Laksmi Susanti, Ni Nyoman Juwita Arsawati (2020).
29. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui bagaimana peran BUMDesa Salosso dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa Katumbangan, 2) mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat BUMDesa Salosso dalam meningkatkan pendapatan masyarakat ddesa Katumbangan. Teknik pengumpulan data berupa observasi (pengamatan langsung), wawancara (*interview*) dan dokumentasi berupa literatur yang mendukung. Implikasi dari Penelitian ini adalah: 1)BUMDesa Salosso perlu melakukan kegiatan pengenalan BUMDesa terhadap masyarakat secara merata agar masyarakat sadar akan pentingnya BUMDesa untuk kemajuan desa serta masyarakat, 2)BUMDesa Salosso sebaiknya melakukan peminjaman barang terhadap masyarakat yang ingin berdagang, 3)BUMdesa Salosso sebaiknya mengganti jenis usaha toserba dengan jenis usaha lain, contohnya adalah air gallon. Ririn Erisyam, Rahmah Muin, Andi Sudarmin Aziz. 2020.
 30. Bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaruh komitmen, kompetensi dan motivasi usaha baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja usaha mikro kecil menengah makanan di Kabupaten Cianjur. Kuesioner didistribusikan kepada 53 orang pelaku usaha yang diambil dengan teknik proposional random sampling. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif verifikatif. Hasil penelitian bahwa variabel komitmen, kompetensi dan motivasi usaha secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja Usaha mikro kecil menengah makanan Kabupaten Cianjur. Variansi kinerja usaha mikro kecil menengah dapat dijelaskan oleh variabel komitmen, kompetensi dan motivasi usaha sebesar 71,4 persen, sedangkan sisanya sebesar 28,6 persen dari variabel lain yang tidak diteliti. Ririn Erisyam, Rahmah Muin, Andi Sudarmin Aziz. 2020.

31. Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Lappariaja belum optimal karena usahausaha BUMDes yang menggerakkan perekonomian masyarakat jumlahnya sedikit, hanya usaha pembiayaan/pemberi kredit yang nyata kontribusinya. Peran BUMDes dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah kerjanya sudah dinikmati oleh sebagian masyarakat melalui sejumlah usaha pelayanan jasa. Pengelolaan Badan BUMDes di Kecamatan Lappariaja dengan berbagai aktifitas kegiatan usaha sudah sesuai dengan syariah kecuali usaha pembiayaan, masih diragukan kedudukannya oleh sebagian pengurus BUMDes. Hamril, Sarjan, Arifin. 2021.
32. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Semamung, khususnya masyarakat pengelolah unit usaha BUMDes dan pengguna dana BUMDes di Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Informan penelitian adalah 5 orang pengelolah unit usaha BUMDes dan 5 orang pengguna dana BUMDes, sehingga jumlah informan penelitian ini adalah 10 orang. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode deskriptif analitik, membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat tentang fakta, sifat-sifat serta hubungan antara peristiwa yang ingin di teliti. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh peningkatan perekonomian yang terjadi pada pengelolah unit saha BUMDes di bidang usaha penyediaan jasa, yaitu, penjahitan, laundry. Usaha industri, yaitu, seme lala atau masker, madu hutan dan kopi bale kawa, dan dibidanga simpan pinjam, yaitu, para nasabah pengguna dana BUMDes. Namun dari ke 5 pengelolah unit usaha BUMDes dan 5 orang pengguna dana BUMDes hanya 2 orang yang dapat mengelolah hasil dari usaha guna untuk pembangunan maupun memperbaiki tempat tinggal. Ke 2 orang itu pun dari pengguna dana BUMDes. Untuk itu penulis menyarankan agar para pengelolah unit usaha BUMDes dan ketigapengguna dana BUMDes dapat mengelolah keuntungan dari usaha yang dijalankan, agar dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kondisi tempat tinggal. Bagi pihak BUMDes harus terus melakukan kontroling dan sekaligus memberikan pandangan yang lebih baik kepada pengelolah unit usaha dan pengguna dana BUMDes tersebut. Dian Hanifah, Muhammad Rafi'i Sanjani 2021.
33. Kegiatan kepariwisataan dapat menjadi solusi untuk mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan. Beberapa daerah kota/kabupaten telah berhasil menggunakan pariwisata untuk mengembangkan daerahnya. Namun pemanfaatan sumber daya pariwisata juga mesti selaras dengan pembangunan

berkelanjutan diantaranya pariwisata berlandaskan budaya dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan yang digunakan berdasarkan studi literature. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dari keseluruhan tahapan pembangunan, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Arief Setijwan, 2018.

34. Pariwisata alam merupakan pariwisata yang memiliki banyak potensi di Indonesia. Perkembangan pariwisata diselaraskan dengan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia sendiri sudah banyak yang mengintegrasikan pariwisata dengan lingkungan melalui konsep ekowisata, di mana pariwisata berkembang tanpa merusak lingkungan sehingga kegiatan pariwisata tersebut berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pengembangan pariwisata alam yang bisa mendukung dan selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Temuan dari penelitian ini adalah di desa wisata Pentingsari terdapat pemanfaatan sumber daya alam untuk dikembangkan sebagai atraksi pariwisata. Selain itu desa wisata Pentingsari juga memiliki sistem sosial yang unik dan bisa menjadi atraksi pariwisata juga. Desa wisata Pentingsari sangat menjaga keberlanjutan lingkungannya melalui sistem sosial yang memanfaatkan sumber daya alam secara proporsional dan menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di sana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah desa wisata Pentingsari mampu mengembangkan pariwisata alam sebagai atraksi pariwisata yang mendukung pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui integrasi aspek-aspek pembangunan berkelanjutan seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Riswandha Risang Aji, 2021.
35. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan gagasan yang cukup banyak dikenal dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) adalah pariwisata yang memperhatikan dampak ekonomi, sosialbudaya, dan lingkungan saat ini hingga masa mendatang. Partisipasi masyarakat menjadi bagian dari salah satu prinsip dari pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Sumber data digunakan merupakan data sekunder. Bentuk partisipasi masyarakat lokal yaitu partisipasi dalam perencanaan, Partisipasi saat pelaksanaan pariwisata, dan partisipasi saat monitoring dan evaluasi pariwisata berkelanjutan. Hal tersebut bisa menjadikan mereka lebih paham tentang program tersebut dan

akan menimbulkan rasa memiliki terhadap program pengembangan pariwisata berkelanjutan. Uchammad Satrio Wibowo, Lutfi Arviana Belia, 2023.

36. Pembangunan kawasan pesisir kabupaten Batubara belum menerapkan konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dari terjadinya degradasi lingkungan, belum dijumpai program konservasi, tingginya angka kemiskinan, belum terciptanya pemerataan pendapatan dan lapangan kerja baru, tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah, kelembagaan yang ada tidak mengacu pada pembangunan berkelanjutan, terjadinya pergeseran budaya yang meninggalkan kearifan lokal. Pembangunan secara parsial seperti pembangunan hanya memperhatikan aspek sosial dan ekonomi saja hasilnya hanya untuk pemerataan, jika pembangunan memperhatikan lingkungan dan sosial hasilnya hanya untuk kenyamanan sedangkan pembangunan yang memperhatikan ekonomi dan lingkungan hasilnya lingkungan akan menanggung beban. Tetapi jika pembangunan memperhatikan secara holistik dari aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya maka tercipta pembangunan berkelanjutan. Strategi pembangunan kawasan pesisir kabupaten batubara adalah merencanakan penggunaan sumberdaya alam sebagai sumber ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Nurmatias, 2018.
37. Penelitian ini membahas tentang Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif Good Governance Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus karena peneliti akan menganalisis dan mengukur sejauh mana optimal atau tidak Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif Good Governance Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Teknik Analisis Data Menggunakan analisis model interaktif dengan menggunakan teori good governance terdapat 4 prinsip yaitu : (1) Aturan Hukum, (2) Partisipasi, (3) Transparansi, dan (4) Akutabilitas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren ini masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan terlibat dalam program BUMDes, Transparansi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren Pengelola BUMDes belum terbuka memberikan informasi kepada masyarakat secara merata, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi data mengenai hasil usaha BUMDes. Selain itu Pengurus BUMDes belum membuat informasi data secara fisik kepada masyarakat seperti : infografis dan baliho, dan Akutabilitas dalam pengelolaan BUMDes di Desa Duren

- dari beberapa pengurus BUMDes yang kurang profesionalitas yaitu mencari komisi atau dana tambahan untuk pribadinya sendiri dalam bekerja. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Desa Duren belum mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mengelola BUMDes dilihat dari segi aturan hukum, partisipasi, transparansi maupun akuntabilitas. Delia Fauziyah Syafikri, Lukmanul Hakim, Rachmat Ramdani. 2021.
38. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan BUMDesa Surya Sejahtera telah dilaksanakan., yaitu Ukuran dan tujuan dari BUMDesa Surya Sejahtera telah dilaksanakan oleh pengelola BUMDesa Surya Sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya dua unit usaha yaitu UED-SP Sumber Rejeki dan UEP-SR Toko Sembako. Hambatan dalam mencapai tujuan juga dialami BUMDesa tetapi seperti adanya mitra kerja yang sudah ada (BRI, BPR, Koperasi atau agen beras) dan tidak adanya penyediaan transportasi untuk UEP-SR Toko Sembako. Sumberdaya finansial yang dimiliki BUMDesa Surya Sejahtera telah mencukupi untuk mendorong proses implementasi kebijakan BUMDesa Surya Sejahtera. Sementara itu sumberdaya manusia dan waktu masih kurang, terutama dalam implementasi UEP-SR Toko Sembako. Para pengelola BUMDesa Surya Sejahtera harus mempunyai karakteristik jujur, aktif, terampil, berdedikasi serta keikhlasan. Karakteristik tersebut telah dimiliki oleh para pengelola BUMDesa Surya Sejahtera. Pengelola BUMDesa Surya Sejahtera mendukung terhadap implementasi BUMDesa Surya Sejahtera. Komunikasi antara pengelola BUMDesa Surya Sejahtera dilakukan setiap hari melalui telepon, rapat pengelola yang dilakukan setiap bulannya dan rapat anggota tahunan dengan masyarakat. Faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik memberikan pengaruh terhadap proses implementasi kebijakan BUMDesa Surya Sejahtera. Pengelola BUMDesa Surya Sejahtera berupaya meminimalisir dan menyesuaikan pengaruh yang berasal dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Saran yang dapat diajukan yaitu melakukan kerjasama dengan mitra kerja yang sudah ada, penyediaan transportasi untuk UEP-SR Toko Sembako, penambahan pengelola bagi UEP-SR Toko dan menentukan jam operasional UEP-SR Toko Sembako. Rosyidatul Ilmiyah, 2015.
39. By the help of village funds, it is hoped that there will be an increase of community income through various training and infrastructure improvements to catch up with other regions. Therefore, the role of community to supervise the village funds management is very expected for the common interest. Transparency and cooperation of all parties is the key of the successful of

village funds implementation in the Village of Maleku. The planning into the reporting process is done openly and is known by all the people in the Village of Maleku. The social welfare of community is a measurement of the development successful. Therefore, village funds provide solutions for community in the Village of Maleku to improve the living standard of the people with various assistance from government. Putra Nugraha. 2018.

40. Fokus pembangunan desa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam mendukung ini, desa diberikan kewenangan lokal berskala desa, termasuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Meskipun memiliki potensi besar, implementasi BUM Desa di Desa Madu Sari, Kabupaten Kubu Raya, menjadi polemik. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang BUM Desa dan keterbatasan teknis anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menciptakan hambatan. Oleh karena itu, diperlukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai metode memecahkan masalah dengan memberikan pelatihan legal drafting, penyusunan materi Perdes, dan latihan simulasi kepada pemangku kepentingan desa. Metode ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam membentuk Perdes tentang BUM Desa, sehingga desa dapat lebih efektif mengelola potensinya demi kesejahteraan bersama. PKM direncanakan berlangsung pada 21 Oktober 2023 di Desa Madu Sari, Kubu Raya, dan diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari perangkat desa, BPD, dan unsur organisasi kemasyarakatan. penyampaian materi diikuti dengan Tanya Jawab, Diskusi, Simulasi/Latihan Penyusunan Perdes dilakukan Evaluasi. Dalam Evaluasi ini dilihat kemampuan para peserta dalam memahami dan menerapkan materi legal drafting yang diberikan dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sudah memahami mengenai BUM Desa dan tata cara membentuk Peraturan desa tentang BUM Desa. Hamdani¹. Muhammad Syafe'i². Endah Mintarsih³. 2024.
41. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian di lakukan di Desa Goras Jaya dengan jumlah sampel 87 orang responden. Pengambilan sampel menggunakan proporsional randaom sampling, dan teknik pengambilan data dengan menggunakan kuisisioner. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda menggunakan bantuan aplikasi SPSS Versi 20. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah. terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah. Terdapat

pengaruh yang positif dan signifikan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah. Sulis Mela Ningrum. 2022.

42. The result are the development of Bejiharjo Village during a Bejiharjo Tourist Village marked by the success of managing object tourist attraction that can be seen from the addition of the secretariat of tourism every years. Enhanced welfare worker of tourist because of the presence a family, increase the jobs variety, increase knowledge in the field of tourism business management, the establishment of social interaction between residents and community participation. Mita Wahyunita. 2016.
43. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Desa Wisata Kampung Susu Dinasty mampu meningkatkan pendapatan Desa Sidem. Dalam proses dimulai dengan pengembangan desa ini akan menjadikan masyarakat Desa Sidem sebagai sumber daya manusia berupa tenaga kerja, dengan demikian akan membantu kesejahteraan masyarakat Desa Sidem. Berkembangnya desa wisata di Desa Sidem akan membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun ada satu hal yang menjadi hambatan dalam pengembangan desa wisata tersebut diantaranya keterampilan yang dimiliki masyarakat untuk menjadi pekerja/karyawan di kampung susu dynasty. Untuk kontribusi peningkatan pendapatan desa Pemerintah Desa Sidem sendiri sudah fokus terhadap peningkatan pembangunan fisik dan non fisik hingga saat ini. Nihla Hikmania. 2019.
44. Besarnya Anggaran Dana Desa Sukomulyo memerlukan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat desa diperlukan suatu lembaga pengelola yang profesional dan transparan. Pembentukan lembaga pengelola Aset Ekonomi Desa/BUMDesa. Berdasar kajian dan analisa terbentuklah Badan Usaha Milik Desa menjadi lembaga pilihan masyarakat Desa Sukomulyo dan Pemerintah Desa Sukomulya sebagai pengelola aset desa. Terbentuknya BUMDes di Desa Sukomulyo diharapkan mampu mengelola Aset desa secara professional dan lebih transparan guna peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sukomulyo itu sendiri. Noor Salim. 2021.
45. Study aims to (1) find out the description of village fund management and the level of community welfare in Ilin Medo Village, Waiblama District. (2) determine the effect of Village Fund management on the level of welfare of the

people of Ilin Medo Village, Waiblama District. The population in this study were elements of the Ilin Medo Village community, totaling 809 residents. By using the slovin formula, the sample in this study was 72 residents. Data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive statistical methods and inferential statistics, namely simple linear regression. Hypothesis testing is done through the t test. The results of the descriptive statistical analysis show that the respondent's perception of the Community Welfare variable is 71.88% in the good category. Furthermore, the respondent's perception of the Village Fund management variable is 70.34% in the good category. The results of the t test show that the Village Fund Management variable has a significant value of 0.000. This significant value is smaller than the 5% alpha level used, so the decision is to reject the null hypothesis (H_0), meaning that the Village Fund Management variable (X) has a significant effect on the Community Welfare variable (Y). In addition, the results of the analysis of determination (R^2) obtained a Coefficient of Determination of 0.523, which means that the contribution of the Village Fund Management variable (X) to the variation of the ups and downs of the Community Welfare variable (Y) is 52.3. Cicilia Ayu Wulandari Nuwa¹, Elisabet Luju², Imelda Virgula Wisang³, Theresia Avilla Fatima⁴. 2023. This

46. The study's findings demonstrate that: 1) MSMEs play a crucial role in enhancing the community's welfare in Namlea Village by: a) creating new job opportunities; b) enhancing community welfare; c) opening up new markets; d) empowering the community; and e) advancing local economic development; and 2) factors that either support or impede MSMEs' efforts to enhance the community's welfare in Namlea Village. Supporting factors include the existence of enthusiasts and government support. In the meantime, impediments include scarce raw resources, bad weather, workers, and workers' lack of expertise. Indarwati. 2023.
47. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 terdiri dari peran kepala desa sebagai motivator yaitu kepala desa mampu mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi hal positif di masa pandemic, seperti mengarahkan agar masyarakat memanfaatkan bantuan langsung tunai dengan sebaik-baiknya, peran kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa mampu untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan seperti memberikan bantuan untuk membuka usaha bengkel misalnya kompresor dan alat bengkel lainnya, dan peran kepala desa sebagai mobilisator adalah kepala desa mengarahkan untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan pembangunan seperti melakukan gotong

royong untuk pembersihan lingkungan pasar dan tempat ibadah. Kedua, faktor pendukung kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi adalah sumber daya aparatur desa yaitu Selama Covid-19 aparatur Desa Mantobua selalu bekerja sama yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat yaitu masyarakat selalu berpartisipasi dalam mencegah penyebaran covid 19 dengan mengikuti protokol kesehatan selama pandemi seperti memakai masker, menjaga jarak bila berada ditempat keramaian, dan penghambat yaitu sumber dana yaitu sumber dana untuk desa Mantobua itu hanya memanfaatkan dana yang berasal dari pemerintah saja sedangkan dana dari desa mantobua sendiri itu belum ada, sumber daya manusia dan teknologi yaitu Masyarakat Desa Mantobua masih banyak yang belum paham kegunaan dari teknologi itu. Banyak dari masyarakat yang tanpa membaca langsung membagikan berita tersebut. Mimin. 2021.

48. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bintara Pembina Desa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk meningkatkan peran Bintara Pembina Desa yang optimal, maka diperlukan tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukungnya, karena bagaimanapun baiknya program yang dilakukan oleh Bintara Pembina Desa tanpa didukung dengan tingkat kesadaran masyarakat, maka pelaksanaan tugas tersebut akan mengalami hambatan. Bintara Pembina Desa merupakan pelaksana pembinaan teritorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa serta dengan segala permasalahan yang penuh dengan kemajemukan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Di sinilah peran Bintara Pembina Desa terhadap kesejahteraan rakyat. Bintara Pembina Desa dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki kapabilitas teritorial dalam memperoleh informasi serta melaporkan dengan cepat, berkomunikasi dengan masyarakat, mendata geografi, demografi, serta kondisi sosial yang berhubungan dengan pertahanan Negara. Hayatul Khairul Rahmat. 2020.
49. Bertujuan untuk menganalisis karakteristik pemanfaat program BUMDesa, menganalisis kinerja BUMDesa di Kabupaten Rokan Hulu, dan menganalisis implikasi BUMDesa terhadap pengentasan kemiskinan, kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode survey untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja BUMDesa dan pemanfaatnya di Kabupaten Rokan Hulu sehingga dapat menemukan implikasi dari kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bagi masyarakat desa. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai

dengan bulan September 2016. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistic (model logit) dengan model estimasi maximum likelihood. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program BUMDesa di Kabupaten Rokan Hulu mempunyai peluang kemungkinan berhasil sebesar 73% dalam pengentasan kemiskinan. Demikian juga dengan peningkatan kesejahteraan peluang kemungkinan berhasil sebesar 71,4%, sedangkan terhadap kemandirian ekonomi masyarakat kinerja BUMDesa juga berimplikasi positif, yaitu peluang kemungkinan untuk berhasil sebesar 77,1%. Muhammad Yunan. 2018.

50. Bertujuan untuk mengetahui: (1) peran BUMDesa Mitra Usaha dalam meningkatkan sektor usaha anggota KUB Mulyasari, (2) peningkatan omzet dan laba sektor usaha anggota KUB Mulyasari. Jenis penelitian ini merupakan penelitian komparasi sebelum dan sesudah adanya peran BUMDesa Mitra Usaha. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota KUB Mulyasari yang berjumlah 32 orang dan semua dijadikan sebagai subjek penelitian, sehingga penelitian ini juga merupakan penelitian sensus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif kuantitatif dengan uji t-berpasangan (paired t-test). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) BUMDesa telah berperan dalam peningkatan sektor usaha ekonomi anggota KUB Mulyasari melalui pemberian pinjaman modal, pemberian pelatihan-pelatihan, serta pemberian fasilitasi pemasaran; (2) Ada perbedaan omzet sebelum dan sesudah, dimana terjadi peningkatan omzet setelah adanya peran BUMDesa; (3) Ada perbedaan laba sebelum dan sesudah, dimana terjadi peningkatan laba setelah adanya peran BUMDesa. Dian Puja Rismaya. 2020.
51. To find research problems, qualitative research methods are used. Research data were collected through three techniques, namely observation techniques, interview techniques, and documentation techniques. To understand the problem of the adoptive researcher, the researcher uses Talcott Parson's structural functionalism theory with the AGIL scheme. From this theory, the researcher analyzes the research problem by analyzing the structural functionalism theory of Talcott Parsons to see how the adaptation of the village government to the Bukit Makmur village community, the achievement of the goals of the village government and the Bukit Makmur village community, the integration between the village government and the Bukit Makmur village community and maintenance of patterns. village government with the Bukit village community. From the research results it is explained that there are two efforts made by the village government in empowering the community through community-based

tourism management, the first is tourism management efforts and the second is the management of MSMEs in collaboration with BUMDes in Bukit Makmur. With these two efforts, the Bukit Makmur village government is empowering the village community. Linda Fitriani. 2022.

52. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution), BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Pembentukan BUM Desa di desa Selensen mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus penelitian: (1) proses pembentukan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (2) peran kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Hasil penelitian ini ialah, pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Selensen sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian kelembagaan, dan dapat dikatakan cukup berhasil. Kemudian, kelembagaan BUM Desa telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Muammar Alkadafi. 2015.
53. Penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Badan Usaha Milik Desa di Masalle kec Masalle kab Enrekang masih terus mengalami perkembangan menuju hasil yang pesat seperti BUMDES yang teras di desa lainnya. Dengan penelitian ini diharapkan agar Pemerintah desa dapat lebih memperhatikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dalam permendes No 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dapat bersinergi serta memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa dan anggaran alokasi dana desa dengan pertimbangan kepentingan orang banyak. Muhammad Said Alfuraqan, Gazali Suyuti. 2020.
54. Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong 2). Untuk Mengetahui Besar Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Untuk dapat mengelola BUMDES agar berkembang dan maju maka terdapat 6 prinsip dimana Penelitian ini menggunakan teori menurut Pusat

Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 prinsip pengelolaan (BUMDES) yaitu: 1) Kooperatif, 2) Partisipatif, 3) Emansipatif, 4) Transparan, 5) Akuntabel. 6) Sustainable. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan persentase (%) dan disajikan bentuk tabulasi distribusi frekuensi dengan menggunakan frekuensi yang dikemukakan oleh Muhammad Ali (1998 : 184). Populasi dalam penelitian ini adalah pengambilan sample diambil berdasarkan teknik accidental sampling dimana mengambil sample berdasarkan kebetulan, sample yang digunakan berjumlah 37 orang, sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 1) Observasi, 2) Kuesioner/ Angket, 3) Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dikategorikan “Efektif” dengan besar 68,87%. Nita Mariani, Lilis Suryani. 2021.

55. Rural tourism has been widely recognized as a means of promoting the revival of traditional villages and has been supported by numerous researchers. It has the potential to provide significant social and economic advantages, making it a popular strategy for rural development in both developed and developing countries. Ahmed Hussein Allawi , Haider Mohammed Jawad Al-Jazaeri. 2023
56. Rural tourism has been widely recognized as a means of promoting the revival of traditional villages and has been supported by numerous researchers. It has the potential to provide significant social and economic advantages, making it a popular strategy for rural development in both developed and developing countries. Nevertheless, a growing body of research has substantiated the significant disruptions that rural tourism has imposed on traditional villages. This study employed the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) qualitative method to systematically analyze 92 papers from WOS and SCOPUS that investigate the impact of rural tourism on traditional villages. The papers were categorized into five groups: spatial, economic, sociocultural, and holistic. Li Yanan , Muhammad Azzam Ismail, Asrul Aminuddin (2024)

Halaman ini sengaja dikosongkan